

**PENGARUH BEBAN PAJAK TANGGUHAN DAN PERENCANAAN
PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA**
(Studi Empiris Pada Perusahaan Perdagangan, Jasa dan Investasi di Bursa
Efek Indonesia)

SKRIPSI

Disusun Oleh:
Andro Trijovianto
165020307111023

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Meraih Derajat Sarjana Akuntansi



JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG

2020



**PENGARUH BEBAN PAJAK TANGGUHAN DAN PERENCANAAN
PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA**

**(Studi Empiris Pada Perusahaan Perdagangan, Jasa dan Investasi di Bursa
Efek Indonesia)**

SKRIPSI

**Disusun Oleh:
Andro Trijovianto**

165020307111023

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Meraih Derajat Sarjana Akuntansi**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2020



LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul :

**Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap
Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Perdagangan, Jasa dan
Investasi di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018)**

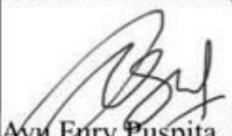
Yang disusun oleh :

Nama : Andro Trijovianto
NIM : 165020307111029
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S-1 Akuntansi

Disetujui untuk diajukan dalam Ujian Komprehensif.

Malang, 5 November 2020

Yang Mengetahui,

Dosen Pembimbing,

Aya Eury Puspita, MSA.,
Ak., CA.
NIP. 2013128812142001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

PENGARUH BEBAN PAJAK TANGGUHAN DAN BEBAN PAJAK TANGGUHAN TERHADAP MANAJEMEN LABA

Yang disusun oleh:

Nama : Andro Trijovianto

NIM : 165020307111029

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Bidang kajian : Akuntansi Perpajakan

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 6 Januari 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Ayu Fury Puspita, MSA., Ak., CA.

NIP. 2013128812142001

(Dosen Pembimbing)

2. Sari Atmini, Dr., M.Si., Ak.

NIP. 197206111997022001

(Dosen Penguji I)

3. Devy Purposari, M.Si., Ak.

NIP. 197511052003122001

(Dosen Penguji II)

Malang, 20 Januari 2021

Ketua Program Studi S1 Akuntansi



Dr. Dra. Endang Mardiaty, M.Si., Ak.

NIP. 195909021986012001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **Andro Trijovianto**
 Tempat, tanggal lahir : **Jakarta, 14 November 1997**
 NIM : **165020307111029**
 Jurusan : **Akuntansi**
 Alamat : **Jl. Pangrango 1/27, Jatibening 1, Kota Bekasi**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :


Pengaruh Beban Pajak Tanggahan dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Perdagangan, Jasa dan Investasi di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018)

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Dosen Pembimbing,

**Ayu Eury Puspita, MSA.,
 AK., CA.
 NIP. 2013128812142001**

Malang, 5 November 2020

Yang membuat pernyataan,


**Andro Trijovianto
 NIM. 165020307111029**

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Tujuan Penelitian	17
1.4 Manfaat Penelitian	17
1.4.1 Manfaat Teoritis	17
1.4.2 Manfaat Praktis	17
1.5 Sistematika Penulisan	18
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	20
2.1 Teori yang Mendasari Penelitian	20
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	20
2.1.2 Teori Akuntansi Positif	24
2.1.3 Manajemen Laba	27
2.1.4 Beban Pajak Tangguhan	35
2.1.5 Perencanaan Pajak	40
2.2 Pengembangan Hipotesis	44
2.2.1 Beban Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap Manajemen Laba	44
2.2.2 Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap Manajemen Laba	47
2.3 Model Penelitian	51
BAB III METODE PENELITIAN	52
3.1 Populasi dan Sampel Penelitian	52
3.2 Data Penelitian dan Sumbernya	53
3.2.1 Jenis dan Sumber Data	53



3.2.2	Teknik Pengumpulan Data	54
3.3	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	54
3.3.1	Variabel Dependen (Variabel Terikat)	55
3.3.2	Variabel Independen (Variabel Bebas)	57
3.4	Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis	58
3.4.1	Analisis Statistik Deskriptif	59
3.4.2	Analisis Regresi Logistik	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		64
4.1	Hasil Sampel Penelitian	64
4.2	Statistik Deskriptif	66
4.3	Uji <i>Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test</i>	71
4.4	Uji kelayakan Keseluruhan Model	72
4.5	Uji Koefisien Determinasi (Nagelkerke's R ²)	73
4.6	Uji Multikolinearitas	75
4.7	Uji Tabel Klasifikasi	76
4.8	Hasil Uji Regresi Logistik	77
4.9	Pembahasan	79
4.9.1	Hubungan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba	79
4.9.2	Hubungan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba	81
BAB V		84
PENUTUP		84
5.1	Kesimpulan	84
5.2	Keterbatasan Penelitian	86
5.3	Saran untuk Penelitian Berikutnya	87
DAFTAR PUSTAKA		88
LAMPIRAN		93

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Hasil Seleksi Sampel Penelitian..... 64

Tabel 4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif – Small Loss Firms 66

Tabel 4.3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif – Small Profit Firms..... 68

Tabel 4.4 Hasil Uji Hosmer and Lemeshow 71

Tabel 4.5 Tabel Uji Overall Model Fit..... 72

Tabel 4.6 Tabel Uji Overall Model Fit..... 73

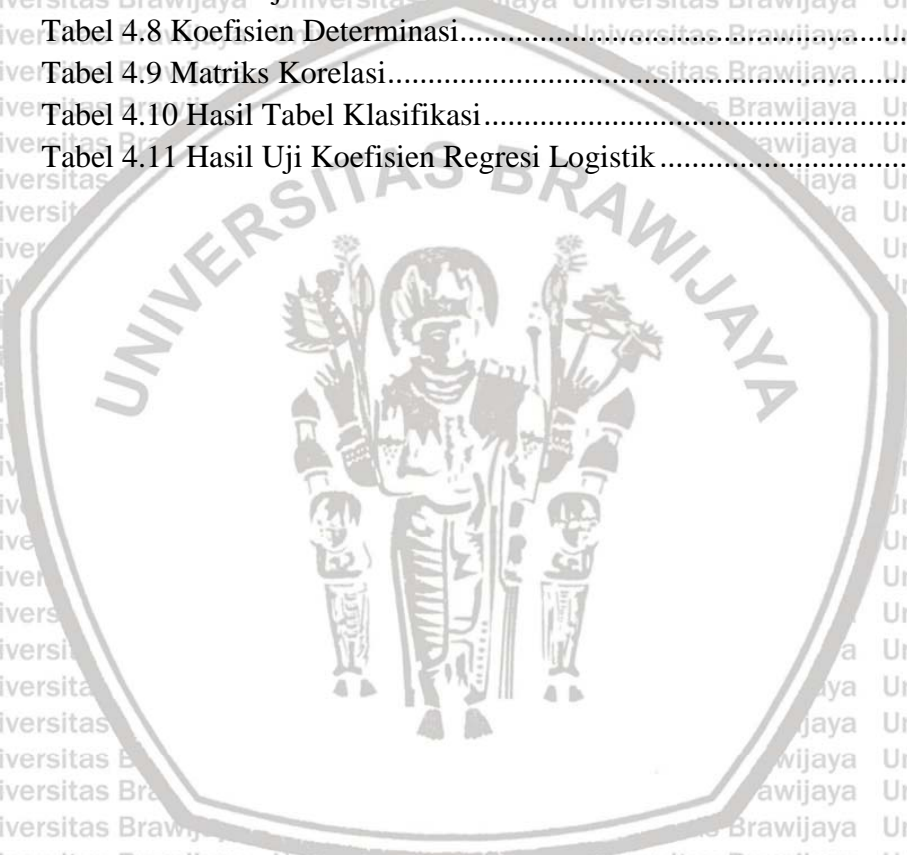
Tabel 4.7 Tabel Uji Overall Model Fit..... 73

Tabel 4.8 Koefisien Determinasi..... 74

Tabel 4.9 Matriks Korelasi..... 75

Tabel 4.10 Hasil Tabel Klasifikasi..... 76

Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik..... 77



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 PDB tahun 2016-2018 (dalam Miliar Rupiah) Harga Konstan 2010 1

Gambar 2.1 Bagan Rerangka Teoritis 51



ABSTRAK**PENGARUH BEBAN PAJAK TANGGUHAN DAN PERENCANAAN PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI DI BURSA EFEK INDONESIA)****Andro Trijovianto**

NIM. 165020307111029

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

e-mail: androtrijov@student.ub.ac.id / telp: +6281 286 261 375

Dosen Pembimbing: Ayu Fury Puspita, M.S.A., Ak., CA.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Objek penelitian ini adalah perusahaan perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2016-2018. Pemilihan sampel ditentukan berdasarkan metode *purposive sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 33 perusahaan perdagangan, jasa dan investasi di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2016-2018, melaporkan dan mempublikasikan laporan keuangan dalam satuan Rupiah, telah diaudit oleh auditor independen per 31 Desember, berisi data mengenai kriteria variabel, dan mempunyai *scaled earning change* dalam range 0 – 0,06 dan -0,09 – 0. Teknik analisis data yang digunakan yaitu statistik deskriptif dan metode regresi logistik. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba dan perencanaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

Kata kunci: beban pajak tangguhan, perencanaan pajak, manajemen laba.

ABSTRACT***THE EFFECT OF DEFERRED TAX EXPENSE AND TAX PLANNING ON EARNINGS MANAGEMENT (A STUDY ON TRADING, SERVICE AND INVESTMENT COMPANIES LISTED IN INDONESIA STOCK EXCHANGE)*****Andro Trijovianto**

NIM. 165020307111029

Faculty of Economics and Business, Brawijaya University, Malang, Indonesia

e-mail: androtrijov@student.ub.ac.id / telp: +6281 286 261 375

Advisor: Ayu Fury Puspita, M.S.A., Ak., CA.

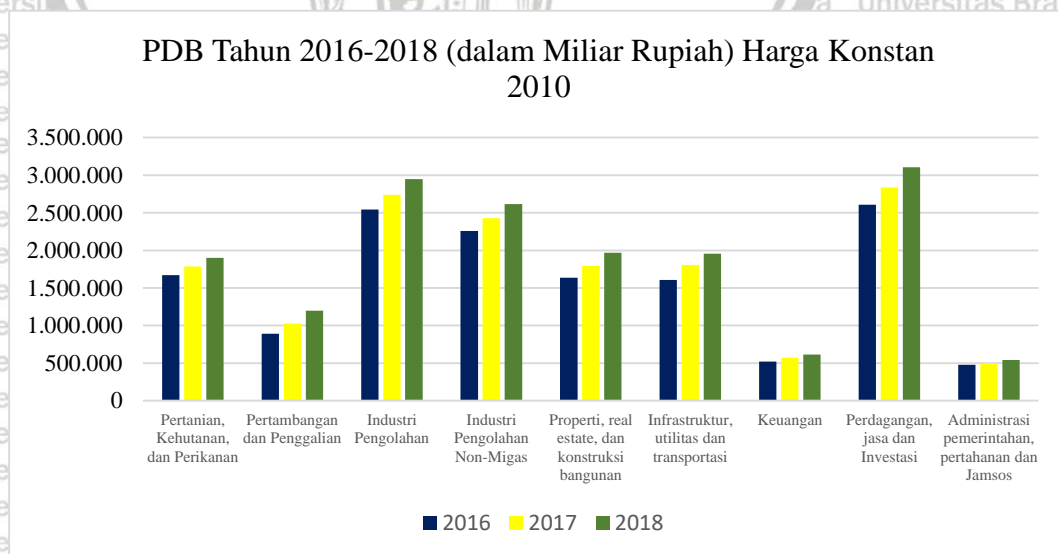
This research aims to test the effect of deferred tax expense and tax planning on earnings management. The objects of this research are trading, service and investment companies listed in Indonesia Stock Exchange between 2016 and 2018. Through purposive sampling method, the samples selected are 33 trading, service and investment companies which are listed in Indonesia Stock Exchange between 2016 and 2018, report and publish their financial reports in IDR currency (audited by independent auditors per December 31 and contain data of variable criteria with scaled earning change in the ranges of 0 – 0.06 and -0.09 – 0. The data are analyzed by descriptive statistics and logistic regression method. The results of the research show that the deferred tax expense has no significant effect on the probability of the companies undergoing earnings management, while tax planning has significant effect on earnings management.

Keywords: *deferred tax expense, tax planning, earnings management.*

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era sekarang ini, perusahaan-perusahaan sedang menghadapi persaingan yang cukup ketat untuk dapat bersaing dan bertahan di pasar global supaya tetap eksis bagi konsumen secara khusus bagi perusahaan yang bergerak di sektor perdagangan, jasa dan investasi. Perusahaan perdagangan, jasa dan investasi memiliki skala yang besar serta memiliki beberapa sub sektor, di antaranya: perdagangan besar barang produksi; perdagangan eceran; restoran, hotel dan pariwisata; advertising, printing dan media; kesehatan; jasa komputer dan perangkatnya; serta perusahaan investasi. Berikut adalah grafik pertumbuhan dalam tiga tahun dari tahun 2016-2018 untuk mengetahui pertumbuhan setiap jenis perusahaan:



Gambar 1.1 PDB tahun 2016-2018 (dalam Miliar Rupiah) Harga Konstan 2010

Sumber: www.bps.go.id data telah diolah, 2019

Grafik pertumbuhan jenis-jenis perusahaan (lapangan usaha) di atas berdasarkan harga konstan menunjukkan bahwa perusahaan perdagangan, jasa dan investasi menjadi salah satu perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang paling besar selama tiga tahun beruntun jika dibandingkan dengan perusahaan lainnya.

Artinya, perusahaan perdagangan, jasa dan investasi merupakan salah satu perusahaan yang memiliki potensi besar dalam menggerakkan perekonomian di Indonesia.

Besarnya tingkat pertumbuhan perusahaan perdagangan, jasa, dan investasi di Indonesia memicu perusahaan yang bergerak di sektor perdagangan, jasa dan investasi ini untuk mampu bersaing dengan perusahaan lainnya melalui keunggulan kompetitif yang dimilikinya. Pengelolaan keuangan yang baik menjadi salah satu cara bagi perusahaan untuk dapat bertahan dalam persaingan industry selain dari kuantitas dan kualitas produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen.

Perusahaan dituntut untuk dapat mengambil kebijakan yang tepat terkait dengan pengelolaan keuangan supaya dapat menjamin keberlangsungan perusahaan.

Menurut Negara & Saputra (2017), pengelolaan keuangan yang baik dapat ditunjukkan melalui besaran laba yang dihasilkan suatu perusahaan.

Indikator kondisi keuangan perusahaan dapat dilihat atau diukur dari besaran laba yang dicapai perusahaan selama periode tertentu. Laba juga menjadi cerminan pengelolaan keuangan dan kinerja suatu perusahaan dapat dikatakan baik atau tidak.

Maka dari itu, informasi laba yang disajikan harus menunjukkan kondisi yang sebenarnya mengenai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Maka dari itu,

perusahaan dituntut untuk selalu menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas untuk konsumen dan mengatur kondisi keuangan perusahaan supaya tetap sehat dan tidak mengalami kebangkrutan. Kondisi keuangan perusahaan tentunya menjadi sorotan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang memperjualbelikan sahamnya di pasar modal karena kondisi keuangan perusahaan mempengaruhi kepentingan bagi para pengguna internal dan eksternal dalam mengambil keputusan sehingga kondisi keuangan perusahaan ini menjadi pertimbangan para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

Informasi laba atau kondisi keuangan memiliki pengaruh yang sangat penting bagi yang berkepentingan dalam sebuah perusahaan. Informasi laba bagi pihak internal dijadikan sebagai tolak ukur terkait dengan pengambilan keputusan mengenai bonus, kompensasi, pencapaian prestasi, kinerja manajemen serta sebagai dasar penentuan pajak. Sementara itu, informasi laba digunakan bagi pihak eksternal sebagai tolak ukur dalam rangka pengambilan keputusan mengenai perkiraan risiko investasi atau kredit yang berarti menjadi perhatian bagi investor dan kreditor serta pemerintah mengenai pajak. Manajemen memiliki peluang untuk mengubah nilai laba dengan memanfaatkan peluang yang tersedia dengan tujuan mencapai kondisi keuangan perusahaan yang baik sesuai dengan kondisi yang diharapkan oleh perusahaan. Upaya tersebut disebut sebagai manajemen laba yaitu manajemen melakukan sebuah intervensi terhadap informasi atau angka yang terdapat dalam laporan keuangan untuk keuntungan pribadi, yaitu pihak perusahaan yang bersangkutan (Schipper, 1989).

Setiap perusahaan khususnya perusahaan yang bergerak di sektor perdagangan, jasa, dan investasi memiliki dorongan dan motivasi yang berbeda-beda dalam melakukan praktik manajemen laba. Pada satu kondisi, perusahaan berusaha untuk menyajikan kinerja keuangan yang tinggi dengan cara menaikkan laba semaksimal mungkin pada laporan keuangan yang disajikan kepada para pihak eksternal.

Namun, laba perusahaan yang tinggi otomatis pajak yang ditanggung perusahaan akan semakin tinggi pula, maka pada kondisi ini perusahaan menginginkan pelaporan laba kena pajak minimum untuk keperluan pajak (Ettredge *et al.*, 2008).

Perusahaan dapat melakukan dengan cara merekayasa laba yang tinggi untuk pelaporan keuangan, namun untuk pelaporan pajak perusahaan tidak merekayasa laba tersebut. Perusahaan yang melakukan manajemen laba akan memicu perbedaan yang besar antara laba akuntansi dan laba perpajakan (Mills & Newberry, 2001) dalam (Irreza & Yulianti, 2012). Perusahaan berupaya untuk mengurangi pembayaran pajak seminim mungkin. Peraturan pajak mengatur hal ini adalah upaya melakukan tindakan penghematan pajak.

Fenomena manajemen laba pernah terjadi terhadap PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN pada tahun 2018. Sepanjang tahun 2018, PLN berhasil mencetak laba bersih Rp11,56 triliun dan mengalami kenaikan sebesar 162,30 persen atau hampir tiga kali lipat dari laba 2017, yakni sebesar Rp4,42 triliun.

Padahal pada kuartal III, PLN masih mengalami kerugian sebesar Rp18,48 triliun yang disebabkan oleh selisih kurs yang merugi hingga Rp17,32 triliun. PLN berhasil memperoleh kenaikan pendapatan dari Rp255,29 triliun pada 2017 menjadi Rp272,89 triliun pada 2018. Sementara itu, kenaikan pendapatan tidak sebanding

dengan kenaikan beban usaha PLN. Beban usaha mengalami kenaikan dari Rp275,47 triliun pada 2017 menjadi Rp308,18 triliun pada 2018. Walaupun PLN mengalami kenaikan beban usaha, rugi selisih kurs hingga 272,27 persen dan beban keuangan yang lebih tinggi dari pendapatan namun PLN tetap menorehkan laba bersih sebesar Rp11,56 triliun. PLN setidaknya melakukan dua hal sehingga berhasil menorehkan laba bersih sebesar Rp11,56 triliun di samping kenaikan beban usaha dan rugi selisih kurs yang cukup besar. Pertama, adalah pendapatan kompensasi yang merupakan piutang atas kompensasi dari pemerintah atas penggantian Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik beberapa golongan pelanggan yang tarif penjualan tenaga listriknya lebih rendah dibandingkan BPP, dan belum diperhitungkan dalam subsidi. Piutang kompensasi ini diakui sebagai pendapatan atas dasar akrual. Per 31 Desember 2018, piutang kompensasi perusahaan sebesar Rp23,17 triliun. Kedua, pendapatan lain-lain bersih naik hingga 359,34 persen dari Rp 3,4 triliun pada 2017 menjadi Rp 15,66 triliun pada 2018 yang didapat dari pendapatan pemerintah. PLN menjelaskan bahwa pendapatan ini diakui sebagai piutang dari pemerintah yang diakui sebagai pendapatan sebesar Rp 7,45 triliun. Akan tetapi, perseroan tidak menyinggung sama sekali kontribusi piutang kompensasi pemerintah ini dalam peningkatan laba. Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto menuturkan pencapaian itu ditopang dari penjualan, efisiensi operasi dan dukungan pemerintah melalui *Domestic Market Obligation* (DMO) batu bara (www.cnnindonesia.com, 2019). Dari fenomena tersebut menunjukkan bahwa manajemen laba dilakukan oleh perseroan melalui kebijakan yang ditentukan dengan mengakui piutang kompensasi sebagai pendapatan atas

akrual pada tahun 2018 setelah sebelumnya tidak dicatat pada tahun 2017, sehingga pendapatan serta laba pada tahun 2018 menjadi meningkat.

Selain itu, fenomena serupa juga terjadi pada PT Pertamina (Persero) pada tahun 2018 bahwa sepanjang tahun 2018 Pertamina melaporkan laba bersih sekitar Rp35,99 triliun, padahal pada kuartal III tahun 2018, Pertamina baru memperoleh laba sebesar Rp5 triliun. Hal ini terjadi karena perhitungan piutang pemerintah atas pembayaran selisih harga BBM yang mencapai Rp41,6 triliun, piutang tersebut berasal dari kompensasi selisih harga BBM pada 2017 dan 2018 yang belum dibayarkan pemerintah dan diakui pada pelaporan per 31 Desember 2018 (www.cnnindonesia.com, 2019). Dari kedua fenomena di atas, menunjukkan bahwa perseroan memiliki kebijakan yang berhubungan dengan pengakuan pendapatan untuk mempengaruhi laba yang dilaporkan pada tahun tertentu sehingga laba dapat meningkat sesuai kebutuhan perseroan dengan memanfaatkan kebijakan yang sah.

Manajemen laba dapat dilakukan melalui beberapa cara adalah dengan melakukan pemerataan laba (*income smoothing*), *taking a bath*, meminimalisasi laba (*income minimization*) dan memaksimalkan laba (*income maximization*) (Scott, 2003: 383-384). Pendekatan yang dapat digunakan dalam menjelaskan konsep manajemen laba adalah dengan pendekatan teori keagenan. Teori keagenan menurut Jensen & Smith (1984) adalah konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Pihak principal adalah pihak yang memberikan kewenangan kepada agen, yaitu pemegang saham dengan tujuan melakukan semua kegiatan atas nama principal dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan, sementara itu agen adalah manajer dalam sebuah perusahaan.

Konsep manajemen laba dapat dijelaskan menggunakan teori keagenan, bahwa adanya konflik kepentingan antara pihak berkepentingan (prinsipal) dengan manajemen atau agen mempengaruhi terjadinya praktik manajemen laba (Negara & Saputra, 2017). Scott (2003:305) menambahkan bahwa teori keagenan merupakan pengembangan dari suatu teori yang mempelajari suatu desain kontrak para agen (manajer) yang bekerja atas nama prinsipal ketika keinginan atau tujuan mereka saling bertolak belakang sehingga tercipta suatu konflik.

Para pihak pengguna laporan keuangan, baik pihak internal maupun eksternal dalam suatu perusahaan kadangkala memiliki berbagai macam kepentingan yang berbeda-beda sehingga berpotensi memunculkan kepentingan yang bertentangan dan konflik antar pihak-pihak berkepentingan, serta dapat merugikan seluruh pihak terkait (Arfani & Sasongko, 2005). Pertentangan atau konflik kepentingan ini dapat terjadi karena pihak internal (manajemen) memiliki keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, kemudian keinginan untuk mendapatkan jumlah kredit yang maksimal dengan bunga minimal, serta keinginan pembayaran pajak yang kecil.

Sementara itu, pihak eksternal seperti pemegang saham memiliki keinginan untuk meningkatkan keuntungan pribadi, kreditor yang ingin memberikan kredit sesuai dengan kemampuan perusahaan, serta pemerintah yang ingin memperoleh penerimaan pajak yang maksimal (Aditama & Purwaningsih, 2014).

Pajak menjadi salah satu sumber terbesar bagi pendapatan negara khususnya Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan bahwa penerimaan pajak tahun 2018 sebesar Rp 1.315,9 triliun.

Sementara itu, target APBN pada tahun 2018 adalah sebesar 1.424 triliun, yang

berarti realisasi penerimaan pajak hanya sebesar 92% dari target APBN tahun 2018.

Artinya, negara mengalami kekurangan penerimaan atau *shortfall* sebesar kurang lebih Rp 108,1 triliun pada tahun 2018. Namun, persentase ini lebih baik daripada tahun 2017 dengan realisasi penerimaan pajak hanya sebesar 89,4% dari target APBN tahun 2017. Pada tahun 2018, sektor perdagangan menyetorkan pajak negara sebesar Rp 234,46 triliun (23,72%), terbanyak kedua setelah sektor pertambangan yang menyetorkan pajak sebesar Rp 80,55 triliun (51,15%), (<http://cnbcindonesia.com>, 2019).

Perusahaan di Indonesia memiliki dua pedoman dalam menyusun laporan keuangan. Pedoman yang pertama adalah mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan pedoman yang kedua adalah peraturan perpajakan. Karena pelaporan laba akuntansi dan pelaporan laba fiskal memiliki dasar atau peraturan yang berbeda sehingga akan menghasilkan informasi laba yang berbeda. Pelaporan laba fiskal digunakan sebagai dasar penghitungan pajak.

Perbedaan pedoman penyusunan laporan keuangan oleh setiap perusahaan di Indonesia diharuskan dengan tujuan menunjukkan kondisi keuangan dan kinerja perusahaan yang kredibel dan informatif yang disusun sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) atau yang dikenal sebagai laporan keuangan komersial, serta dengan tujuan untuk menghitung penghasilan kena pajak dan beban pajak yang dibayarkan kepada negara atau yang dikenal sebagai laporan keuangan fiskal yang disusun berdasarkan peraturan perpajakan. Perbedaan di antara keduanya menghasilkan dua informasi laba yang berbeda, yakni laba sebelum pajak atau laba akuntansi dan penghasilan (laba) kena pajak atau laba fiskal.

Manajemen laba dapat dilakukan oleh perusahaan dengan memanfaatkan kesempatan yang tersedia melalui kebijakan akuntansi yang merupakan hak perusahaan dalam memilih kebijakan akuntansi sesuai dengan tujuan perusahaan.

Kebijakan akuntansi yang dimaksud adalah mengenai estimasi akuntansi serta pemilihan metode akuntansi karena sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) manajemen diperbolehkan dalam memutuskan estimasi akuntansi, seperti estimasi piutang tak tertagih, masa manfaat aset tetap dan nilai residu dari aset tetap serta jangka waktu amortisasi aset tak berwujud. Sementara itu, dalam peraturan perpajakan mengatur lebih sedikit alternatif metode yang ditawarkan, seperti estimasi piutang tak tertagih tidak diperbolehkan sebagai pengurang pendapatan dalam menghitung laba fiskal serta masa manfaat dan tarif penyusutan aset tetap dan aset tak berwujud sudah diatur berdasarkan pengelompokan aset yang berbeda, sehingga dapat disimpulkan bahwa peraturan perpajakan lebih ketat dalam mengatur penghitungan laba fiskal.

Berdasarkan PSAK No. 46 bahwa standar tersebut mengatur mengenai perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan, termasuk beban pajak tangguhan.

Pada standar tersebut disebutkan bahwa manajemen memiliki hak untuk memilih kebijakan akuntansi dalam menentukan nilai pencadangan beban/penghasilan pajak tangguhan yang disebabkan adanya perbedaan standar atau peraturan antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan. Perusahaan atau manajemen pastinya menginginkan laba akuntansi yang meningkat tanpa diikuti meningkatnya laba fiskal demi memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya sesuai dengan penjelasan Sumomba (2012) yang mengindikasikan prioritas manajemen lebih

memilih kenaikan laba dan penurunan biaya akuntansi daripada meningkatkan laba dan menurunkan biaya fiskal.

Implikasi PSAK No. 46 yang dikaitkan dengan isu manajemen laba dapat dijelaskan dalam teori akuntansi positif yang membahas mengenai pemilihan kebijakan, prosedur, metode atau standar akuntansi yang dilakukan oleh manajer.

Dalam teori akuntansi positif ini, manajemen menentukan salah satu prosedur akuntansi dari beberapa alternatif yang tersedia dengan tujuan yang diinginkan oleh perusahaan, sehingga manajer memiliki kecenderungan untuk melakukan sesuatu tindakan oportunistik (Scott, 2003: 369). Hal itu dilakukan untuk menentukan kebijakan akuntansi yang paling menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Teori akuntansi positif mencakup teori keagenan di dalamnya yang mengindikasikan terjadi asimetri informasi antara pemegang saham dan pemerintah sebagai principal dengan manajemen sebagai agen. Asimetri informasi ini merupakan suatu kondisi terjadinya ketidakseimbangan informasi yang diperoleh antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan pemilik kepentingan di antaranya pemegang saham dan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pihak pemilik kepentingan sebagai prinsipal memiliki informasi yang lebih sedikit dibandingkan pihak agen

sehingga pihak agen yakni manajemen memiliki peluang untuk melakukan tindakan untuk memenuhi motivasi atau tujuan tertentu yang diinginkan oleh manajemen melalui sebuah praktik yang disebut dengan istilah manajemen laba. Menurut (Phillips *et al*, 2003), terdapat tiga motivasi utama yang memicu perusahaan melakukan manajemen laba yaitu dengan tujuan menghindari penurunan laba, menghindari kerugian dan menghindari kegagalan peramalan yang dibuat oleh

analisis. Seperti yang sudah diuraikan di atas, manajemen laba dapat dilakukan oleh perusahaan dengan memanfaatkan kesempatan yang tersedia melalui kebijakan akuntansi yang merupakan hak perusahaan dalam memilih kebijakan akuntansi sesuai dengan tujuan perusahaan.

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada perusahaan yang melakukan manajemen laba dengan tujuan untuk menghindari kerugian. Alasan penelitian ini hanya berfokus pada manajemen laba untuk menghindari kerugian karena mengacu pada penelitian Yulianti (2004) mengenai model distribusi laba sebagai pengukur manajemen laba menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEJ antara tahun 1999-2002 hanya terbukti melakukan manajemen laba untuk menghindari kerugian, tidak untuk tujuan lain yaitu menghindari penurunan laba maupun menghindari kegagalan peramalan analisis. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Philips *et al* (2003) yang menemukan bahwa manajemen laba dilakukan untuk memenuhi dua tujuan, yaitu untuk menghindari penurunan laba dan menghindari kerugian. Hal ini dikarenakan penelitian Yulianti (2004) mengenai distribusi laba sebagai pengukur manajemen laba di Indonesia menggunakan data perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia sehingga berbeda dengan penelitian (Phillips *et al*, 2003) yang menggunakan data perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. Sehingga penelitian ini hanya menguji manajemen laba untuk menghindari kerugian sesuai dengan penelitian Yulianti (2004) yang membuktikan bahwa fenomena manajemen laba di Indonesia hanya terjadi pada distribusi laba (tidak pada distribusi perubahan laba).

PSAK No. 46 mengatur mengenai perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan, termasuk beban pajak tangguhan. Pada standar tersebut disebutkan bahwa manajemen memiliki hak untuk memilih kebijakan akuntansi dalam menentukan nilai pencadangan beban/penghasilan pajak tangguhan yang disebabkan adanya perbedaan standar atau peraturan antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan kebebasan perusahaan dalam memilih kebijakan akuntansi sesuai dengan tujuan perusahaan. Implikasi PSAK No. 46 yang dikaitkan dengan isu manajemen laba dapat dijelaskan dalam teori akuntansi positif yang membahas mengenai pemilihan kebijakan, prosedur, metode atau standar akuntansi yang dilakukan oleh manajer. Dalam teori akuntansi positif ini, manajemen menentukan salah satu prosedur akuntansi dari beberapa alternatif yang tersedia dengan tujuan yang diinginkan oleh perusahaan, sehingga manajer memiliki kecenderungan untuk melakukan sesuatu tindakan oportunistik (Scott, 2003: 369). Hal itu dilakukan untuk menentukan kebijakan akuntansi yang paling menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Beban pajak tangguhan muncul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal (Philips *et al*, 2003). Pajak Tangguhan terjadi akibat perbedaan antara PPh Terutang (pajak penghasilan yang dihitung berbasis pada penghasilan kena pajak yang sesungguhnya dibayar kepada dihitung berbasis penghasilan sebelum pajak) sepanjang menyangkut perbedaan temporer. Bila laba fiskal yang dihasilkan besar, maka beban pajaknya pun akan besar sehingga dapat mengurangi keuntungan yang akan didapat oleh perusahaan (Sibarani *et al*, 2015).

Selain itu, kaitan teori keagenan dengan manajemen laba yaitu adanya perbedaan kepentingan antara pihak agen dan prinsipal, agen yang dimaksud adalah perusahaan sementara prinsipal dalam konteks ini adalah pemerintah. Konflik kepentingan yang dimaksud adalah mengenai pembayaran pajak karena pada satu sisi, pihak agen menginginkan pembayaran pajak yang rendah sementara pihak prinsipal yaitu pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang besar. Pihak agen dapat melakukan berbagai cara untuk meminimumkan pembayaran pajak dengan cara yang legal tanpa melanggar peraturan yang ada, yaitu melakukan penghematan pajak melalui manajemen pajak. Pada umumnya manajemen pajak dapat disebut sebagai media untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Lumbantoruan, 1994: 354). Menurut Suandy (2011:6) terdapat dua tujuan manajemen pajak dilakukan, yaitu untuk menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang semestinya. Tujuan dari manajemen pajak itu dapat dipenuhi melalui fungsi-fungsi manajemen pajak, yaitu perencanaan pajak, pelaksanaan kewajiban perpajakan, dan pengendalian pajak.

Perencanaan pajak merupakan suatu upaya untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara yang dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Penghematan pajak, termasuk perencanaan pajak ini memanfaatkan segala hal yang tidak diatur oleh undang-undang sehingga tidak ada pelanggaran peraturan perpajakan yang berlaku. Pada penelitian ini, manajemen laba dilakukan hanya untuk menghindari laba yang mengacu pada penelitian

Yulianti (2004) bahwa manajemen laba di Indonesia hanya dilakukan untuk menghindari laba. Dalam kondisi ini, berarti menunjukkan bahwa agen diindikasikan untuk menaikkan laba dengan tujuan menghindari kerugian sementara itu perencanaan pajak cenderung dilakukan untuk menurunkan laba. Namun, untuk tetap memenuhi tujuan perusahaan untuk menaikkan laba untuk menghindari kerugian dengan tetap membayar pajak dengan biaya yang rendah dapat dilakukan melalui perencanaan pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak, sehingga manajemen laba untuk menghindari kerugian dan perencanaan pajak memiliki arah yang negatif karena kecenderungan perencanaan pajak untuk menurunkan laba. Berdasarkan penelitian Romantis *et al* (2020) arah negatif tersebut terjadi karena perusahaan melakukan *tax avoidance* sehingga semakin rendah perencanaan pajak, semakin tinggi *tax avoidance* dalam mengoptimalkan efisiensi beban pajak maka semakin besar tindakan manajemen laba. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak tanpa menurunkan laba akuntansi dengan tetap mengoptimalkan efisiensi pajak dapat dilakukan dengan memanfaatkan *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian di atas, manajemen laba untuk menghindari kerugian dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak. Manajemen laba dapat dijelaskan dengan pendekatan teori keagenan yang menguraikan bahwa terjadi konflik atau perbedaan kepentingan antara pihak prinsipal dengan agen bahwa agen memiliki kepentingan supaya perusahaan dapat membayar pajak dengan nominal kecil sehingga agen melakukan penghematan pajak melalui perencanaan pajak. Selain itu, manajemen laba juga dapat dijelaskan

dengan pendekatan teori akuntansi positif yang menyebutkan bahwa perusahaan memiliki kebebasan dalam memilih dan menentukan kebijakan, prosedur, metode atau standar akuntansi. Hal itu sesuai dengan PSAK No. 46 yang mengatur mengenai perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan termasuk beban pajak tangguhan, yaitu kebebasan perusahaan dalam menentukan kebijakan akuntansi dalam menentukan nilai pencadangan beban/penghasilan pajak tangguhan.

Ditambah, sejumlah penelitian telah dilaksanakan untuk menguji pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba.

Beberapa penelitian mengungkapkan hasil bahwa beban pajak tangguhan secara signifikan mampu menemukan atau mempengaruhi praktik manajemen laba dengan tujuan tertentu. Berikut adalah peneliti yang menemukan hasil beban pajak tangguhan secara signifikan mendeteksi manajemen laba, yaitu Phillips *et al* (2003)

dengan tujuan perusahaan melakukan praktik tersebut adalah untuk menghindari kerugian dan penurunan laba, kemudian Yulianti (2005) membuktikan tujuan perusahaan hanya untuk menghindari kerugian pada laporan keuangan, serta

Sumomba (2012) yang menguji perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Namun, hasil berbeda ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh

Hamzah (2009), Fitriany (2016) yang menguji perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2013, mengungkapkan hasil bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh secara signifikan dalam mendeteksi manajemen laba.

Selain faktor beban pajak tangguhan, ada juga faktor lainnya yaitu perencanaan pajak yang berpengaruh terhadap manajemen laba. Beberapa penelitian menemukan hasil bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh secara signifikan

terhadap manajemen laba, penelitian tersebut dilakukan oleh Ulfah (2014), Sumomba (2012), dan Fitriany (2016). Sementara itu, hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Aditama & Purwaningsih (2014) yang menguji perusahaan-perusahaan non manufaktur di BEI, Wardani dan Santi (2018) yang menguji perusahaan sub sektor *food and beverages* di BEI.

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh para peneliti terdahulu menunjukkan bahwa pengaruh beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba memiliki hasil penelitian yang berbeda-beda atau bervariasi, maka dari itu peneliti hendak melakukan penelitian lanjutan yang bersifat pengulangan (replikatif). Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak mampu mendeteksi adanya praktik manajemen laba untuk menghindari kerugian seperti penelitian terdahulu namun dengan menggunakan data-data terbaru dan teraktual.

Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi di Bursa Efek Indonesia)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada uraian di atas, maka dari itu dapat disimpulkan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini yaitu:

1. Apakah beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba?

2. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan atas uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditentukan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba.
2. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka manfaat yang mampu didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Kegunaan secara teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperluas literatur dan membandingkan teori-teori yang bersangkutan dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya pada saat penelitian. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi teori dan literatur yang sudah ada dalam meningkatkan kualitas implementasi perpajakan dan akuntansi. Penelitian ini juga diharapkan memberikan informasi dan referensi empiris bagi pengembangan ilmu akuntansi dan bagi peneliti berikutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Manajemen

Manfaat dari penelitian ini bagi manajemen yaitu supaya manajemen lebih teliti dalam memperhatikan faktor-faktor penerapan PSAK No 46 yang mengandung *trade-off* antara relevan dan objektivitas atas pelaksanaan perencanaan pajak serta pengakuan terhadap beban pajak tangguhan.

2. Bagi Peneliti

Manfaat dari penelitian ini bagi peneliti yaitu menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai teori-teori di bidang perpajakan khususnya mengenai perencanaan pajak, beban pajak tangguhan dan manajemen laba.

3. Bagi Investor

Manfaat dari penelitian ini bagi investor adalah sebagai sumber informasi atas laba yang dilaporkan apakah ada rekayasa yang dilakukan sehingga dapat dipakai untuk pengambilan keputusan oleh investor.

4. Bagi Akademisi

Manfaat dari penelitian ini bagi akademisi adalah hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber literatur dan referensi untuk mengadakan penelitian berikutnya yang berkaitan dengan variabel beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan penulisan penelitian ini yaitu berbentuk skripsi yang akan terbagi dalam beberapa bab melalui sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Telaah Pustaka dan Pengembangan Hipotesis, bab ini berisikan mengenai landasan teori sebagai kerangka dasar pemikiran pengkajian dan analisis masalah yang mengambil referensi dari berbagai literatur, kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis yang disertai bagan kerangka teoritis.

BAB III Metode Penelitian, bab ini berisikan mengenai langkah-langkah yang dilakukan dan diuraikan secara rinci tentang desain penelitian, populasi dan penentuan sampel penelitian, jenis data dan sumber penelitian yang didapatkan, variabel penelitian, metode analisis data dan pengujian hipotesis serta penjelasan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini berisikan seluruh uraian dan deskripsi mengenai hasil analisis pembahasan objek penelitian yang dilakukan.

BAB V Penutup, bab ini berisikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, keterbatasan penelitian dan saran yang diberikan peneliti terhadap pihak-pihak pengguna penelitian ini.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori yang Mendasari Penelitian

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi adalah konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Pihak prinsipal adalah pihak yang memberikan kewenangan kepada agen dengan tujuan melakukan semua kegiatan atas nama prinsipal dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan, sementara itu agen adalah manajer dalam sebuah perusahaan (Jensen & Smith, 1984). Prinsipal yang dimaksud di antaranya adalah pemilik perusahaan, pemerintah dan kreditur. Jensen & Meckling (1976) mengemukakan bahwa hubungan keagenan merupakan suatu kontrak antara satu atau lebih prinsipal dengan menggunakan orang lain atau agen (manajer) dalam menjalankan suatu perusahaan. Teori agensi merupakan teori yang mendasari hubungan antara prinsipal dan agen dengan asumsi bahwa setiap individu termotivasi oleh kepentingannya masing-masing sehingga memicu terjadinya konflik antara prinsipal dan agen. Anthony & Govindarajan (2005: 269) berpendapat bahwa teori keagenan merupakan konsekuensi akibat adanya fungsi kontrol yang terpisah oleh manajemen atas fungsi kepemilikan yang dilakukan oleh pemegang saham. Hal ini menimbulkan munculnya pertentangan yang terjadi terhadap hubungan antara dua pelaku ekonomi yaitu prinsipal dan agen. Konflik kepentingan akan muncul dan meningkat pada saat pihak prinsipal tidak

mengetahui informasi yang memadai mengenai kinerja agen yang disebabkan oleh prinsipal yang tidak mampu mengontrol aktivitas agen dalam perusahaan.

Sementara itu agen memiliki informasi yang lebih banyak dan menyeluruh tentang kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan. Kondisi ini disebut sebagai asimetri informasi. Asimetri informasi ini merupakan suatu kondisi terjadinya ketidakseimbangan informasi yang diperoleh antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan *stakeholders* (Hairu, 2009). Selain itu, menurut M. Hanafi (2014) bahwa pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan risiko perusahaan, pihak tertentu mempunyai informasi lebih baik dibandingkan dengan pihak luar.

Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara pihak prinsipal dan agen berpotensi memunculkan keinginan bagi agen untuk melakukan penyembunyian informasi dengan tujuan supaya prinsipal tidak mengetahui informasi perusahaan secara keseluruhan sehingga membuka peluang bagi agen (manajer) untuk meraup keuntungan pribadi akibat dari asimetri informasi ini.

Seorang agen (manajer) dapat melakukan manajemen laba dalam pelaporan keuangan untuk menyamarkan kinerja ekonomi perusahaan dan mengelabui prinsipal (pemegang saham) demi mengambil keuntungan pribadi pihak manajemen. Dengan tingginya tingkat asimetri informasi antara manajer dengan pemilik kepentingan, maka memicu manajemen untuk melakukan manajemen laba sehingga biaya keagenan juga akan semakin tinggi dan menunjukkan bahwa asimetri informasi dengan manajemen laba memiliki hubungan positif (Ujiyanto, 2004). Selain itu, pihak agen (manajer) juga berpotensi melakukan kecurangan

dengan menyampaikan informasi yang tidak sesuai kondisi sebenarnya terkait dengan pajak dengan tujuan untuk menurunkan nilai beban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah.

Hal ini mengakibatkan terjadinya preferensi risiko dan tujuan kerja yang berbeda di antara kedua belah pihak sehingga muncul biaya tambahan sebagai biaya agensi. Jensen & Meckling (1976) mengemukakan bahwa sekurang-kurangnya terdapat tiga jenis biaya agensi, antara lain:

a. *Monitoring Cost*

Monitoring cost merupakan biaya yang muncul dan ditanggung oleh prinsipal untuk mengukur, mengamati, dan mengendalikan perilaku manajer untuk memonitor perilaku agen. Biaya yang termasuk dalam biaya monitoring adalah biaya audit, rencana kompensasi eksekutif, dan biaya untuk memberhentikan manajer. Sebelumnya biaya agensi ditanggung dan dibayarkan oleh prinsipal, namun kali ini biaya agensi sudah ditanggung oleh agen karena kompensasi yang diterima oleh agen sudah disesuaikan dengan biaya *monitoring* tersebut.

b. *Bonding Cost*

Bonding cost merupakan biaya pengikatan bagi agen dengan tujuan supaya agen dapat melakukan yang terbaik untuk kepentingan perusahaan. Kompensasi akan diberikan kepada agen secara wajar dan agen tidak akan menerima kompensasi jika mereka tidak melakukan sesuai dengan harapan pemilik perusahaan.

c. *Residual Loss*

Residual loss merupakan penurunan nilai perusahaan atau kesejahteraan prinsipal sebagai akibat dari perbedaan kepentingan antara pihak prinsipal dengan agen dan tidak terlaksananya kegiatan *monitoring* dan *bonding*.

Menurut Einsenhard (2004) dalam teori keagenan ditekankan pada cara untuk mengatasi dua permasalahan yang kemungkinan dapat terjadi dalam hubungan keagenan, yaitu: (1) masalah keagenan yang dapat timbul pada saat keinginan dari agen dan prinsipal berlawanan dan sulit bagi principal untuk melakukan verifikasi tentang apa yang sesungguhnya dilakukan oleh agen; (2) permasalahan pembagian risiko yang dapat timbul pada saat agen dan prinsipal memiliki sikap yang bertentangan terhadap risiko. Einsenhard (2004) menyatakan bahwa terdapat asumsi-asumsi mengenai sifat dasar yang dimiliki oleh manusia yakni: (1) manusia pada dasarnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi manusia mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*).

Ketiga sifat ini menyebabkan informasi yang didapat manusia untuk manusia lain selalu dipertanyakan reliabilitasnya dan informasi yang disampaikan tersebut diterima dengan tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya atau lebih dikenal dengan informasi yang tidak simetris (*asymmetry information*) (Ujiyanto, 2007), sehingga hal tersebut memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba. Akibat dari terjadinya ketidaksimetrisan informasi antara manajemen (agen) dan prinsipal, maka akan memberikan kesempatan kepada manajemen untuk bertindak *opportunistic*, yaitu dengan memperoleh keuntungan pribadi. Dalam hal pelaporan keuangan, manajemen melakukan



manajemen laba untuk menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Dengan semakin tingginya asimetri informasi antara pemilik dan agen yang mendorong pada tindakan manajemen laba oleh manajemen akan memicu pada semakin tingginya biaya keagenan dan menunjukkan ada hubungan positif antara asimetri informasi dengan manajemen laba (Ujiyanto, 2007).

Konsep mengenai manajemen laba dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan *agency theory* (teori keagenan), atas dasar teori keagenan ini laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen mengandung kebijakan manajemen laba.

Hal ini dimotivasi karena terciptanya peluang yang dilihat oleh manajemen dengan melakukan manajemen laba untuk menaikkan laba sehingga laba yang disajikan lebih tinggi dibandingkan dengan laba yang sesungguhnya. Motivasi manajemen melakukan tindakan tersebut berhubungan dengan kompensasi atau bonus yang akan didapatkan oleh pihak manajemen. Maka dari itu, teori keagenan menyatakan apabila praktik manajemen laba dipengaruhi oleh adanya konflik kepentingan antara pihak yang berkepentingan (prinsipal) dengan manajemen sebagai suatu pihak yang menjalankan kepentingan (agen). Konflik tersebut muncul pada saat setiap pihak berupaya untuk mencapai suatu tingkat kemakmuran yang diinginkannya.

2.1.2 Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif sangat erat kaitannya dengan manajemen laba (*earnings management*), teori akuntansi positif ini mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen dalam menetapkan prosedur akuntansi yang maksimal dan memiliki tujuan tertentu. Pada teori akuntansi positif, perusahaan

menentukan salah satu prosedur akuntansi dari beberapa alternatif yang tersedia dengan tujuan meminimumkan biaya dan memaksimalkan nilai dari perusahaan tersebut. Dari beberapa alternatif prosedur akuntansi yang tersedia dan manajemen bebas untuk memilih salah satu alternatif tersebut untuk tujuan tersebut, maka manajer memiliki kecenderungan untuk melakukan sesuatu tindakan oportunistik (Scott, 2003: 369). Hal itu dilakukan untuk menentukan kebijakan akuntansi yang paling menguntungkan bagi perusahaan tersebut.

Watts & Zimmerman (1986) dalam Indira (2004) menyebutkan bahwa teori akuntansi positif memiliki tiga hipotesis yang mendorong motivasi manajemen untuk mengambil tindakan manajemen laba yang dihubungkan dengan tindakan oportunistik yang dilakukan. Tiga hipotesis tersebut dalam teori akuntansi positif menguji perilaku etis seseorang dalam mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan atau dalam melakukan manajemen laba (Sulistyanto, 2008: 63). Tiga hipotesis tersebut antara lain:

a. *The Bonus Plan Hypothesis*

Dalam hipotesis ini, pihak manajemen perusahaan berencana untuk memberikan bonus sehingga manajer lebih cenderung untuk memilih kebijakan akuntansi dengan melakukan perubahan atau menggeser keuntungan (laba) yang dilaporkan pada laporan keuangan dari periode mendatang ke periode berjalan (saat ini) yang membuat pelaporan laba saat ini menjadi meningkat. Rencana ini bertujuan untuk menunjukkan kesuksesan kinerja manajer karena keberhasilan manajer dilihat dari besarnya tingkat laba perusahaan dan manajer dapat mendapatkan bonus yang tinggi pada setiap periode.

b. *The Debt to Equity Hypothesis*

Dalam hipotesis ini sangat erat kaitannya dengan syarat-syarat dalam perjanjian utang perusahaan yang wajib dipenuhi. Pada saat kondisi perusahaan sedang terancam karena kemungkinan tidak dapat memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian utang tersebut, maka manajer perusahaan akan berupaya untuk tetap dapat memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian tersebut. Dengan itu, manajer perusahaan akan memilih kebijakan atau metode akuntansi dengan mengubah atau menggeser keuntungan (laba) perusahaan dari periode mendatang ke periode tahun berjalan demi meningkatkan nilai laba (*income increasing*) pada periode saat ini.

Hal ini bertujuan untuk menghindari atau menunda terjadinya pelanggaran perjanjian yang akan berakibat sanksi bagi manajer.

c. *The Political Cost Hypothesis*

Pada hipotesis ini, perusahaan dihadapi dengan biaya politik, semakin besar biaya politik yang ditanggung perusahaan maka manajer cenderung menginginkan laba yang rendah demi meminimalkan biaya politik yang harus ditanggung. Dengan itu, manajer akan berupaya untuk menurunkan nilai laba perusahaan yang dilaporkan pada periode berjalan seminimum mungkin dengan cara menentukan kebijakan akuntansi yang menangguhkan atau menunda keuntungan (laba) yang dilaporkan dari periode saat ini ke periode mendatang.

Perusahaan memiliki kecenderungan untuk meminimalkan jumlah laba yang dilaporkan pada periode berjalan demi memaksimalkan penghematan atau penangguhan pajak (pajak tangguhan) sehingga manajemen laba dapat dipengaruhi oleh beban pajak tangguhan sebagai motivasi penghematan pajak dalam *the*

political cost hypothesis yaitu hubungan pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak) dan perusahaan.

2.1.3 Manajemen Laba

Manajemen laba didefinisikan sebagai suatu langkah intervensi yang dilakukan oleh manajemen dengan tujuan tertentu terhadap pelaporan keuangan untuk mengambil beberapa keuntungan pribadi (Schipper, 1989). Intervensi yang dimaksud adalah manajer melakukan upaya yang dengan sengaja melakukan perubahan informasi dalam laporan keuangan sehingga *stakeholders* tidak mengetahui secara utuh dan informasi sebenarnya mengenai kondisi dan kinerja perusahaan. Intervensi yang biasa dilakukan oleh manajemen adalah dengan mengubah angka pada laporan keuangan khususnya laba.

Menurut Sulistyanto (2008: 6), manajemen laba merupakan sebuah upaya manajer perusahaan untuk melakukan intervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan sehingga informasi yang disajikan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang hendak mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Sedangkan menurut Healy & Wahlen (1999) dalam Sulistyanto (2008: 50), manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan pertimbangan (*judgment*) dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk mengubah laporan keuangan, dengan tujuan untuk memanipulasi besaran (*magnitude*) laba kepada beberapa *stakeholders* tentang kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil perjanjian (kontrak) yang tergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan.

Scott (2003: 377-383

b) menyebutkan bahwa terdapat beberapa motivasi yang memicu manajer untuk mengadakan manajemen laba, antara lain:

a. Motivasi Bonus (*Bonus Purpose*)

Pemegang saham akan memberikan sejumlah insentif dan bonus sebagai langkah timbal balik atas kinerja manajer dalam menjalankan operasional perusahaan. Biasanya laba menjadi tolak ukur dalam menentukan kinerja manajemen, semakin tinggi laba maka bonus yang akan diterima manajer juga akan menjadi lebih besar. Hal ini dilihat manajer sebagai peluang untuk memperoleh bonus yang besar karena manajer memegang kendali atas informasi laba perusahaan dan bertindak secara oportunistik untuk melakukan manajemen laba dengan mengatur dan memaksimalkan laba tahun berjalan demi memperoleh bonus yang akan diterima secara maksimal.

b. Motivasi Kontraktual Lainnya (*Other Contractual Motivation*)

Perjanjian kontraktual memiliki syarat-syarat perjanjian yang harus dipenuhi sehingga menuntut manajer untuk dapat memenuhi segala syarat yang ada dalam perjanjian tersebut karena terdapat sanksi jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban perjanjian tersebut. Hal ini memotivasi manajer untuk menentukan kebijakan akuntansi yang dapat memenuhi kewajiban dalam perjanjian kontraktual tersebut, maka manajer melakukan manajemen laba demi memenuhi perjanjian kontraktual (utang) dan terhindar dari sanksi.

c. Motivasi Politik (*Political Motivation*)

Biaya politik menjadi faktor yang memotivasi manajer dalam melakukan manajemen laba. Hal ini dikarenakan laba yang tinggi juga akan memunculkan

biaya politik yang besar sehingga manajer akan memilih kebijakan akuntansi yang dapat menurunkan laba bersih yang dilaporkan.

d. **Motivasi Pajak (*Taxation Motivation*)**

Biaya pajak juga menjadi salah satu faktor yang memotivasi manajer melakukan praktik manajemen laba. Hal ini akan mempengaruhi besarnya biaya pajak yang harus disetorkan oleh perusahaan kepada pemerintah, semakin besar laba perusahaan akan semakin besar pula pajak yang harus ditanggung perusahaan.

Maka, manajer akan melakukan manajemen laba dengan berupaya meminimalkan laba demi mengurangi beban pajak yang harus ditanggung perusahaan.

e. **Pergantian direksi atau *Chief Executive Officer* (CEO)**

Suatu saat perusahaan akan memiliki periode tertentu untuk melakukan pergantian direksi. Praktik manajemen laba ini seringkali dilakukan pada sekitar periode pergantian direksi. Pada akhir masa jabatan, direksi termotivasi untuk menaikkan laba secara maksimal supaya kinerjanya tetap dinilai baik dan dapat memperoleh bonus yang besar pada akhir masa jabatannya.

f. ***Initial Public Offering* (IPO)**

IPO adalah kondisi pada saat perusahaan akan menjual saham kepada publik untuk pertama kalinya atau disebut *go public*. Hal ini membuat perusahaan akan memiliki nilai pasar untuk pertama kalinya. Maka, manajemen akan menggunakan strategi manajemen laba dengan memaksimalkan laba pada laporan keuangannya untuk memperoleh harga saham perusahaan yang tinggi.

g. **Pemberian Informasi kepada Investor**

Investor pasti ingin mengetahui informasi laporan keuangan perusahaan untuk menilai kondisi dan kinerja perusahaan tersebut. Investor akan menggunakan

laporan keuangan tersebut untuk mengambil keputusan dan memprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang. Hal ini mendorong manajer untuk melakukan manajemen laba dan berusaha menyajikan laba sebaik mungkin supaya laporan keuangan dinilai baik.

Manajemen laba yang hendak dilakukan oleh manajer harus dilaksanakan dengan cermat dengan memilih alternatif metode akuntansi terlebih dahulu dengan tujuan agar pemakai laporan keuangan tidak mengetahui hal ini. Dengan demikian, manajer harus merancang strategi yang matang supaya pihak eksternal tidak mengetahui adanya manajemen laba yang dilakukan. Scott (2003: 383-384) menjelaskan bahwa terdapat empat teknik manajemen laba, antara lain:

a. *Taking a bath*

Teknik ini akan dilakukan ketika perusahaan sedang mengalami periode buruk yang tidak menguntungkan dan tidak dapat dihindari seperti sedang mengalami masalah organisasi atau sedang mengadakan restrukturisasi. Pada kondisi ini, manajer akan melakukan manajemen laba dengan mengakui adanya biaya-biaya pada periode mendatang dan kerugian pada periode berjalan. Hal ini menjadikan laba perusahaan pada periode berjalan menjadi sangat rendah (rugi) jika dibandingkan dengan periode sebelum dan sesudahnya. Namun dengan melakukan *taking a bath* ini, laba periode selanjutnya akan menjadi lebih tinggi.

b. *Income Minimization*

Teknik ini merupakan manajemen laba yang dilaksanakan dengan mengubah laba pada laporan keuangan periode berjalan lebih rendah dari laba sebenarnya. Teknik ini biasanya dilakukan pada saat perusahaan sedang

memperoleh profitabilitas yang sangat tinggi sehingga manajer tidak ingin perusahaannya mendapat perhatian secara politis oleh pihak-pihak berkepentingan.

Kebijakan yang dapat diterapkan oleh manajer untuk meminimalisasi laba adalah dengan penghapusan biaya iklan, barang modal dan aset tidak berwujud, biaya penelitian dan pengembangan, dan lain-lain.

c. *Income Maximization*

Teknik ini merupakan manajemen laba yang dilaksanakan dengan mengubah laba pada laporan keuangan periode berjalan lebih tinggi dari laba sebenarnya. Dengan ini laba akan menjadi tinggi, sehingga teknik ini diterapkan dengan tujuan agar bonus yang diperoleh menjadi lebih besar serta untuk tujuan penghindaran pelanggaran atas perjanjian kontraktual utang. Kebijakan yang dapat diterapkan oleh manajer untuk memaksimalkan laba adalah dengan mempercepat pencatatan pendapatan, menunda atau memindahkan biaya ke periode selanjutnya.

d. *Income Smoothing*

Teknik ini merupakan salah satu bentuk manajemen laba yang paling populer, teknik ini dilakukan dengan membuat pemerataan laba akuntansi sehingga cenderung konsisten (rata) dari satu periode ke periode lainnya. Dalam teknik ini, manajer akan menurunkan atau menaikkan laba untuk mengurangi ketimpangan laba yang dilaporkan sehingga laba perusahaan akan terlihat stabil dan tidak berisiko tinggi saat dibandingkan dengan periode-periode lainnya. Laba yang relatif stabil cenderung lebih disukai oleh investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan.

Sulistyanto (2008: 34) menyebutkan bahwa ada empat cara yang dipakai oleh manajer untuk melakukan manajemen laba, yaitu:

a. Mengakui dan mencatat pendapatan lebih cepat satu periode atau lebih

Cara ini dilakukan oleh manajer pada saat pendapatan periode mendatang atau pendapatan yang tidak bisa ditentukan kapan dapat direalisasi diakui dan dicatat sebagai pendapatan pada periode tahun berjalan sehingga nilai pendapatan pada periode tahun berjalan menjadi lebih tinggi daripada pendapatan sebenarnya.

Dengan meningkatnya pendapatan, maka akan berdampak pada laba yang juga akan meningkat. Kinerja perusahaan akan terlihat lebih baik pada periode ini sehingga mempengaruhi investor untuk menanamkan modalnya ke perusahaan.

b. Mengakui pendapatan lebih cepat satu periode atau lebih

Cara ini dilakukan manajer pada kondisi pendapatan pada periode berjalan diakui sebagai pendapatan pada periode sebelumnya sehingga membuat pendapatan pada periode berjalan lebih rendah daripada pendapatan yang sesungguhnya. Hal ini berakibat pada menurunnya laba pada periode berjalan dan lebih rendah daripada laba sebenarnya. Hal ini bertujuan agar kinerja perusahaan akan terlihat lebih buruk pada periode ini sehingga mempengaruhi investor untuk menjual saham perusahaan, juga untuk mengurangi pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan serta menghindari pelanggaran perjanjian kontraktual.

c. Mencatat pendapatan palsu

Cara ini dilakukan perusahaan dengan melakukan manipulasi transaksi pendapatan yang sebenarnya tidak pernah terjadi dan terealisasi sampai kapanpun.

Hal ini membuat pendapatan periode berjalan meningkat dan juga akan berdampak pada laba yang ikut meningkat sehingga pendapatan dan laba menjadi lebih besar

daripada nilai yang sesungguhnya pada periode berjalan. Dengan demikian, kinerja perusahaan akan terlihat baik sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan investor untuk membeli saham perusahaan.

d. Mengakui dan mencatat biaya lebih cepat atau lambat

Cara ini dilakukan oleh manajer perusahaan dengan mengakui dan mencatat biaya-biaya yang seharusnya menjadi biaya periode mendatang sebagai biaya periode berjalan sehingga jumlah biaya yang terjadi pada periode berjalan menjadi tinggi dan lebih besar daripada biaya yang sebenarnya. Hal ini berdampak pada laba yang akan menurun pada periode berjalan karena biaya yang relatif besar. Maka dari itu, kinerja perusahaan akan cenderung terlihat buruk dan dapat mempengaruhi investor dalam mengambil keputusan untuk melakukan penjualan saham perusahaan, juga untuk mengurangi pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan serta menghindari pelanggaran perjanjian kontraktual. Namun hal ini akan membuat laba pada periode selanjutnya berpotensi lebih besar karena biaya yang seharusnya dicatat pada periode selanjutnya telah digeser ke periode berjalan.

Yulianti (2005) berpendapat bahwa perilaku manajemen laba dapat ditentukan melalui salah satu pendekatan yaitu pendekatan distribusi laba. Pada pendekatan distribusi laba ini dilakukan identifikasi batas pelaporan laba (*earnings threshold*) dan mendapatkan bahwa perusahaan yang berada di bawah *earnings threshold* akan berupaya untuk melampaui batas tersebut yaitu melalui manajemen laba. *Earnings threshold* memiliki dua macam yang disebutkan oleh Holland & Ramsay (2003), yaitu:

1). Titik pelaporan laba nol, yang berarti tingkat usaha manajemen laba untuk menghindari pelaporan kerugian.

2). Titik perubahan laba nol, yang berarti tingkat usaha manajemen laba untuk menghindari penurunan laba.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Yulianti (2004) menunjukkan bahwa manajemen laba dilakukan untuk menghindari kerugian pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEJ tahun 1999-2002 serta menemukan bahwa terjadi *kink* dalam distribusi laba perusahaan. Sangat sedikit perusahaan-perusahaan yang melaporkan kerugian dalam jumlah kecil (*small loss firms*), sementara itu sangat banyak perusahaan-perusahaan yang melaporkan keuntungan dalam jumlah kecil (*small profit firms*) sehingga menimbulkan terjadinya *kink* dalam distribusi laba perusahaan. Yulianti (2004) menambahkan atas penemuannya bahwa *small profit firms* adalah perusahaan-perusahaan yang mempunyai nilai distribusi laba (*Net Income/Market Value Equity*) pada kisaran 0 - 0,06 yang mengindikasikan perusahaan melakukan manajemen laba serta *small loss firms* adalah perusahaan-perusahaan yang mempunyai distribusi laba (*Net Income/Market Value Equity*) pada kisaran -0,09 – 0 yang mengindikasikan bahwa perusahaan tidak melakukan manajemen laba. Berdasarkan penelitian tersebut membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia melakukan manajemen laba hanya berfokus pada distribusi laba, bukan pada distribusi perubahan laba yang berarti manajemen laba dilakukan untuk tujuan menghindari kerugian saja.

2.1.4 Beban Pajak Tangguhan

Berdasarkan PSAK No. 46 dalam Waluyo (2012: 272), beban pajak (*tax expense*) merupakan total agregat pajak masa kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*) yang telah dihitung dalam laba rugi akuntansi pada periode berjalan yang diakui sebagai beban atau penghasilan. Pajak kini adalah total pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak pada periode tahun berjalan, sementara itu pajak tangguhan adalah total pajak penghasilan terutang yang diakui untuk periode mendatang karena terjadi perbedaan temporer (waktu) antara laba akuntansi dan fiscal menurut peraturan perpajakan. Waluyo (2012: 273) menambahkan bahwa pajak tangguhan adalah total pajak penghasilan yang terpulihkan pada periode mendatang karena adanya perbedaan temporer yang dapat dikurangi dari sisa kerugian yang bisa dikompensasikan. Maka, dari adanya pengakuan pajak tangguhan ini memiliki dampak atas laba atau rugi bersih yang menjadi berkurang karena adanya potensi beban atau manfaat pajak tangguhan yang diakui. Pajak penghasilan tangguhan yang diakui ini harus dicatat dan disajikan secara lengkap dalam laporan keuangan perusahaan.

Pajak tangguhan timbul karena adanya perbedaan pajak penghasilan (PPh) terutang pajak dengan beban pajak penghasilan (beban PPh). PPh terutang merupakan pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak (PKP) yang seharusnya disetorkan kepada pemerintah, sementara beban PPh merupakan pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan laba perusahaan sebelum pajak. Perbedaan antara pajak penghasilan terutang dengan beban pajak penghasilan akan memunculkan pajak tangguhan selama perbedaan tersebut terkait

dengan perbedaan temporer (waktu). Zain (2008: 186) menyebutkan bahwa terdapat hal-hal yang dapat menyebabkan aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan terjadi, antara lain:

- a. Jika penghasilan kena pajak (PKP) lebih kecil dari penghasilan sebelum pajak (PSP), maka pajak terutang lebih kecil dari beban pajak, sehingga menghasilkan kewajiban pajak tangguhan. Penghitungan kewajiban pajak tangguhan adalah dengan cara perbedaan temporer dikalikan dengan tarif pajak yang sesuai.
- b. Jika penghasilan kena pajak (PKP) lebih besar dari penghasilan sebelum pajak (PSP), maka pajak terutang lebih besar dari beban pajak, sehingga menghasilkan aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan adalah sama dengan perbedaan tarif pajak pada saat perbedaan tersebut terpulihkan.

Beban pajak tangguhan terjadi pada saat kewajiban pajak tangguhan lebih besar daripada aset pajak tangguhan, yang berarti penghasilan sebelum pajak komersial lebih besar daripada penghasilan kena pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar beban pajak tangguhan, maka manajemen laba dilakukan untuk meningkatkan laba serta semakin besar beban pajak tangguhan mengindikasikan bahwa tindakan manajemen melakukan pemilihan kebijakan akuntansi semakin besar. Sementara itu, pada saat aset pajak tangguhan lebih besar daripada kewajiban pajak tangguhan, yang berarti penghasilan sebelum pajak komersial lebih kecil daripada penghasilan kena pajak menghasilkan manfaat pajak tangguhan.

Pada prinsipnya, perbedaan temporer (waktu) menyebabkan terjadinya PPh pada masa yang akan datang sehingga memunculkan pajak tangguhan. Perbedaan ini muncul karena adanya perbedaan antara perlakuan akuntansi dan perpajakan ditambah kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan pada masa mendatang sehingga pajak penghasilan pada masa mendatang ini perlu diakui, dihitung, disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan (baik laporan posisi keuangan maupun laporan laba komprehensif) periode tertentu beserta dengan perbedaan yang timbul antara laba akuntansi yang muncul dari laporan keuangan fiskal (Rini & Asrori, 2014). Yulianti (2015) mengemukakan bahwa beban pajak tangguhan muncul karena adanya beda waktu (temporer) antara laba akuntansi (laporan keuangan yang disusun menurut SAK untuk kepentingan eksternal) dengan laba fiskal (untuk dasar penghitungan pajak yang dihitung berdasarkan aturan perpajakan) sehingga mencerminkan jumlah beda waktu (beda temporer) yang telah dikalikan dengan suatu tariff pajak marginal. Penyebab beda temporer, yaitu karena penerapan kebijakan akrual sehingga pengakuan penghasilan atau biaya antara perlakuan akuntansi dengan pajak diakui secara berbeda.

Penyebab terjadinya perbedaan antara penghasilan sebelum pajak dengan penghasilan kena pajak, menurut Zain (2008:199), juga berpotensi menimbulkan perbedaan antara beban pajak penghasilan (PPh) dengan pajak penghasilan (PPh) terutang, dan dapat dibagi menjadi lima kelompok sebagai berikut:

a. Perbedaan Permanen/Tetap

Perbedaan ini muncul akibat adanya ketentuan perundang-undangan perpajakan, terdapat beberapa penghasilan yang tidak diakui sebagai objek pajak

atau disebut penghasilan bukan objek pajak, namun menurut komersial penghasilan tersebut tetap diakui sebagai penghasilan. Hal tersebut juga berlaku terhadap biaya, menurut peraturan perpajakan terdapat beberapa biaya yang tidak boleh diakui sebagai biaya atau biaya tersebut tidak boleh dikurangkan, namun menurut komersial biaya tersebut tetap diakui sebagai biaya. Perbedaan permanen ini disebut sebagai perbedaan mutlak, maka tidak akan ada saldo tandingan (*counterbalance*) sehingga tidak perlu adanya alokasi pajak penghasilan *interperiod*.

b. Perbedaan Waktu/Temporer/Sementara

Perbedaan ini muncul akibat adanya ketentuan peraturan perundang-perundangan dengan ketentuan akuntansi (komersial). Pada peraturan fiskal, terdapat beberapa penghasilan atau biaya yang dapat dikurangkan pada periode akuntansi terdahulu atau pada periode selanjutnya dari periode saat ini. Sementara itu, pada ketentuan komersial penghasilan atau biaya tersebut harus diakui dan dicatat pada periode akuntansi yang bersangkutan. Ada beberapa jenis perbedaan waktu, yaitu:

- 1) Perbedaan temporer kena pajak, yaitu perbedaan yang memicu jumlah pajak untuk penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai aset yang tercatat menjadi terpulihkan atau nilai tersebut menjadi lunas. Penghitungan jumlah *Future tax liability* akan sama dengan kewajiban pajak tangguhan dengan cara mengalikan perbedaan temporer kena pajak dengan tarif PPh (pasal 17). Maka, jumlah yang dihitung tersebut merupakan jumlah kewajiban pajak tangguhan.

- 2) Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, yaitu perbedaan yang memicu pengurangan suatu jumlah yang diperbolehkan untuk perhitungan laba



fiskal periode mendatang, pada kondisi sekarang ini dicatat sebagai aset terpulihkan atau nilai kewajiban tercatat tersebut menjadi lunas.

Penghitungan *future tax refundable* akan sama dengan jumlah aset pajak tangguhan dengan cara mengalikan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan (dikompensasi) dengan tarif PPh (pasal 17). Maka, jumlah yang dihitung tersebut merupakan jumlah aset pajak tangguhan.

c. Kompensasi Kerugian

Komersial tidak mengakui adanya kompensasi kerugian, berbeda dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengakui kompensasi kerugian.

Pada saat perusahaan mengalami kerugian pada periode tertentu, maka kerugian tersebut akan dikompensasikan selama lima tahun mendatang sejak periode terjadinya kerugian.

d. Kredit Pajak Investasi

Jika sebuah perusahaan membeli suatu aset tertentu, maka pada jumlah persentase tertentu dari biaya perolehan aset tersebut boleh dikurangkan dari PPh terutang pada periode pembelian (perolehan) aset tersebut. Kredit pajak investasi tidak membuat timbulnya perbedaan antara penghasilan sebelum pajak dengan penghasilan kena pajak, namun akan menimbulkan perbedaan antara beban pajak penghasilan dan pajak penghasilan terutang.

e. Alokasi Pajak *Interperiod*

Untuk keperluan laporan keuangan komersial, sejumlah pajak penghasilan dibagikan ke:

- 1) Penghasilan operasional berkelanjutan;
- 2) Sebagai akibat operasional yang tidak berlanjut;

- 3) Hal-hal luar biasa;
- 4) Efek kumulatif dari perubahan prinsip akuntansi pada laporan keuangan;
dan
- 5) Penyesuaian dengan periode terdahulu.

2.1.5 Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak (*tax planning*) menurut Mohammad Zain (2005:43) dalam bukunya Manajemen Perpajakan menyebutkan bahwa : “Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) adalah proses pengorganisasian usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Tujuan utama yang hendak diperoleh dari perencanaan pajak ini secara umum disebutkan oleh Pohan (2013: 21) adalah sebagai berikut:

1. Meminimalisasi beban pajak terutang dengan tujuan efisiensi namun tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak.
3. Meminimalkan potensi terjadi *tax surprise* pada saat fiskus melakukan pemeriksaan pajak.
4. Menunaikan kewajiban perpajakan secara tepat, efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perpajakan, antara lain:

a. Mematuhi seluruh ketentuan administratif sehingga tidak terkena sanksi, berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana, misalnya bunga, denda, penjara, dsb.

b. Melakukan ketentuan, peraturan, undang-undang perpajakan terkait pelaksanaan pembelian, pemasaran, dan fungsi keuangan dengan efektif, misalnya pemotongan dan pemungutan pajak (PPH pasal 21, pasal 22, dan pasal 23).

Terdapat dua jenis perencanaan pajak yang dikemukakan oleh Suandy (2011: 118), yaitu:

1. Perencanaan pajak nasional (*national tax planning*); dan
2. Perencanaan pajak internasional (*international tax planning*).

Dari kedua jenis perencanaan tersebut, perbedaan utamanya adalah terletak pada peraturan pajak yang diberlakukan. Perencanaan pajak nasional cukup undang-undang dalam negeri yang perlu diperhatikan dan diterapkan oleh wajib pajak, sedangkan perencanaan pajak internasional perlu memperhatikan undang-undang dalam negeri ditambah undang-undang dari negara yang terlibat serta perjanjian pajak antara pihak-pihak yang terlibat.

Pada umumnya manajemen pajak dapat disebut sebagai media untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Lumbantoruan, 1994: 354). Menurut Suandy (2011:6) terdapat dua tujuan manajemen pajak dilakukan, yaitu untuk menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang semestinya.

Tujuan dari manajemen pajak itu dapat dipenuhi melalui fungsi-fungsi manajemen pajak, yaitu

1. Perencanaan pajak;
2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan; dan
3. Pengendalian pajak.

Perencanaan pajak merupakan suatu upaya untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara yang dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Penghematan pajak, termasuk perencanaan pajak ini memanfaatkan segala hal yang tidak diatur oleh undang-undang sehingga tidak ada pelanggaran peraturan perpajakan yang berlaku. Tahap awal sebelum melakukan manajemen pajak adalah dengan melakukan perencanaan pajak, yaitu dengan mengidentifikasi dan menyeleksi peraturan perpajakan untuk dapat melakukan penghematan pajak. Manajemen pajak dapat dilakukan dengan cara legal yaitu *tax avoidance* dan ilegal yaitu *tax evasion*. Upaya manajemen pajak ini tetap harus dilakukan secara legal dengan memperhatikan dan mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku, tidak menentang undang-undang yang ada sehingga terhindar dari tuduhan upaya penggelapan pajak dan terhindar dari sanksi dan hukuman yang berlaku. Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecilkan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu setiap wajib pajak akan membuat rencana pengenaan pajak atas setiap tindakan (*taxable events*) secara

seksama. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa perencanaan pajak adalah proses pengambilan faktor pajak yang relevan dan faktor nonpajak yang material untuk menentukan apakah, kapan, bagaimana, dan dengan siapa (pihak mana) dilakukan transaksi, operasi, dan hubungan dagang yang memungkinkan tercapainya beban pajak pada *tax events* yang serendah mungkin dan sejalan dengan tercapainya tujuan perusahaan (Suandy 2011:8).

Dalam membuat *Tax Planning* perlu dibuat strategi agar hasil yang didapatkan sesuai dengan yang diharapkan. Berikut ini adalah strategi umum dalam membuat *Tax Planning* (Pohan, 2013:10), yaitu:

a. *Tax Saving*

Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya, perusahaan dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.

b. *Tax Avoidance*

Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya, perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21.

c. Menghindari Pelanggaran atas Peraturan Perpajakan

Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa: Sanksi administrasi yakni denda, bunga atau kenaikan serta sanksi pidana yaitu pidana atau kurungan.

d. Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjualan dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.

e. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan

Wajib Pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka. Misalnya, PPh Pasal 22 atas Impor, PPh Pasal 23 atas penghasilan jasa atau sewa dan lain-lain.

2.2 Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Beban Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap Manajemen Laba

Kewajiban pajak tangguhan yang meningkat selaras dengan perusahaan yang lebih awal mengakui pendapatannya atau menunda pengakuan biayanya untuk tujuan laporan keuangan komersial pada periode bersangkutan dibandingkan tujuan pelaporan pajak. Pengakuan pendapatan yang lebih awal atau penundaan biaya yang dilakukan oleh perusahaan menandakan bahwa manajemen melaksanakan

praktik manajemen laba pada laporan keuangan komersial. Seiring dengan meningkatnya praktik manajemen laba, maka kewajiban pajak tangguhan perusahaan juga akan meningkat dan diakui sebagai beban pajak tangguhan (Phillips *et.al*, 2003). Yulianti (2005) membuktikan bahwa beban pajak tangguhan dapat digunakan sebagai alternatif untuk membuktikan probabilitas manajemen laba untuk menghindari kerugian. Dalam melanjutkan hasil yang didapat tersebut, Philips *et al* (2003) menginvestigasi perusahaan-perusahaan yang terkait melakukan manajemen laba dengan perubahan dari komponen aset dan kewajiban pajak tangguhan (kewajiban pajak tangguhan bersih) yang merupakan refleksi dari nilai beban pajak tangguhan pada laporan laba rugi.

Hubungan antara beban pajak tangguhan dengan manajemen laba dapat dijelaskan melalui teori akuntansi positif, yaitu mengenai kebebasan manajemen dalam memilih kebijakan, standar, dan metode akuntansi yang digunakan khususnya pengaturan mengenai perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan termasuk beban pajak tangguhan yang tertuang dalam PSAK No. 46. Beban pajak tangguhan dalam penelitian ini digunakan untuk memprediksi manajemen laba untuk memenuhi tujuan menghindari kerugian. Beban pajak tangguhan menunjukkan bahwa laba akuntansi lebih besar dibandingkan dengan laba fiskal sehingga mengindikasikan bahwa manajemen melakukan upaya untuk menaikkan laba untuk tujuan menghindari kerugian. Hal ini mengindikasikan bahwa manajemen melakukan diskresi yang besar terhadap pemilihan kebijakan akuntansi yang tersedia. Perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal yang besar menunjukkan semakin besar diskresi manajemen yang dicerminkan oleh beban pajak tangguhan,

maka semakin besar pula probabilitas manajemen melakukan manajemen laba untuk menghindari kerugian.

Berdasarkan keinginan manajemen untuk menaikkan laba dengan tujuan menghindari kerugian yang dilakukan dengan melakukan kewenangan dalam pemilihan kebijakan akuntansi yang dapat dilihat dari besaran beban pajak tangguhan, maka hal ini sesuai dengan hipotesis dalam teori akuntansi positif yang dijelaskan oleh Watts & Zimmerman (1986) yaitu *the bonus plan hypothesis* dan *the debt to equity hypothesis*. Hipotesis tersebut menjelaskan suatu kondisi yang memotivasi manajemen dalam melakukan peningkatan laba perusahaan. *The bonus plan hypothesis* menyebutkan bahwa manajemen menginginkan kenaikan laba untuk menunjukkan kesuksesan kinerja manajer dan keinginan manajemen untuk setidaknya tetap mendapatkan bonus, sehingga pada kondisi perusahaan yang rugi maka manajemen tidak akan mendapatkan keuntungan yang membuat kinerja manajer dianggap buruk dan manajer tidak akan mendapatkan bonus. Kemudian, *the debt to equity hypothesis* yang berkaitan dengan syarat perjanjian utang perusahaan. Motivasi manajemen untuk menaikkan laba disebabkan oleh kondisi perusahaan yang terancam tidak dapat memenuhi syarat perjanjian utang tersebut dan terhindar dari sanksi bagi manajemen. Maka dari itu, kondisi perusahaan yang rugi akan tidak menguntungkan manajemen karena berhadapan dengan masalah tersebut, sehingga manajer melakukan manajemen laba untuk menaikkan laba perusahaan dengan tujuan menghindari kerugian.

Penelitian yang dilakukan oleh Yulianti (2005) membuktikan bahwa beban pajak tangguhan memiliki pengaruh signifikan terhadap probabilitas perusahaan

melakukan manajemen laba dalam rangka upaya menghindari kerugian, dengan ini akan berarti nilai variabel beban pajak tangguhan yang semakin besar maka probabilitas perusahaan melaksanakan manajemen laba dalam rangka upaya menghindari kerugian juga semakin besar. Pada penelitian terdahulu, Sumomba & Hutomo (2012), juga membuktikan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hamzah (2009) dan Fitriany (2016) yang membuktikan bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap praktik manajemen laba.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

H_1 = Beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap probabilitas manajemen laba untuk menghindari kerugian.

2.2.2 Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap Manajemen Laba

Pembayaran pajak merupakan kewajiban yang harus disetorkan oleh wajib pajak, baik pribadi maupun badan sehingga sebuah perusahaan wajib membayarkan pajak kepada pemerintah setiap tahunnya. Namun, perusahaan pasti menginginkan supaya menanggung pajak serendah mungkin dan pasti mengusahakan hal itu karena dapat menambah beban pengeluaran perusahaan, di sisi lain pemerintah membutuhkan pemasukkan yang besar dari pajak yang diterima untuk membiayai kepentingan negara. Maka dari itu, timbul konflik kepentingan yang disebabkan karena terjadi perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah yang

membuat perusahaan memiliki motivasi untuk meminimalkan beban pajak yang harus disetorkan kepada pemerintah. Maka dari itu, hal ini dapat dijelaskan melalui teori keagenan yang membahas mengenai konflik kepentingan yang terjadi antara pemerintah sebagai prinsipal dengan perusahaan (manajemen) sebagai agen yang mempunyai perbedaan kepentingan mengenai pembayaran pajak.

Menurut Zain (2005:43) bahwa : “Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) adalah proses pengorganisasian usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Pohan (2013:13), perencanaan pajak adalah: “Usaha yang mencakup perencanaan pajak agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien”

Usaha yang dilakukan dalam perencanaan pajak adalah mencari berbagai celah (*loopholes*) agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal.

Pembayaran pajak yang minimal berarti manajemen akan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi jika dibandingkan pembayaran pajak yang cukup tinggi. Di sisi lain, perusahaan tetap menginginkan laba akuntansi yang tinggi tanpa perlu menurunkan laba akuntansi demi mengurangi pembayaran pajak. Terlebih fokus manajemen laba di Indonesia adalah untuk menghindari kerugian yang berarti laba akan diusahakan meningkat dengan pembayaran pajak yang minimum.

Teori yang dapat dikaitkan dengan manajemen laba melalui perencanaan pajak adalah teori akuntansi positif yang menggambarkan tindakan manajemen dalam menentukan prosedur dan metode akuntansi, sehingga kebijakan yang

dilakukan adalah dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan untuk melakukan efisiensi beban pajak. Efisiensi pembayaran pajak ini dalam manajemen laba untuk tujuan menghindari pelaporan kerugian dapat dijelaskan dalam teori akuntansi positif oleh Watts & Zimmerman (1986) yaitu *the bonus plan hypothesis*.

Bonus atau *reward* menjadi motivasi manajemen sehingga menginginkan kenaikan laba tanpa diiringi kenaikan beban pajak atau menginginkan penghematan pajak sehingga pajak yang dibayarkan menjadi minimum. Dengan ini, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan lebih karena tidak perlu membayar pajak yang besar serta mencapai tujuan perusahaan untuk tetap meningkatkan laba guna menghindari pelaporan kerugian. Untuk menciptakan pembayaran pajak yang rendah, manajemen cenderung dapat melakukan penurunan laba dengan tujuan tersebut. Sehingga berbanding terbalik dengan tujuan manajemen laba dari penelitian ini adalah untuk menghindari kerugian, yang artinya manajemen melakukan usaha untuk meningkatkan laba. Untuk memenuhi efisiensi pembayaran pajak dan tujuan manajemen laba dalam penelitian ini, maka perencanaan pajak dapat dilakukan dengan cara *tax avoidance* yang berarti perencanaan pajak dengan manajemen laba memiliki arah yang negatif sesuai dengan penelitian Romantis *et al* (2020) bahwa hasil perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap manajemen laba yang mengindikasikan perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Ulfah (2014) mengungkapkan bahwa perencanaan pajak yang semakin tinggi maka akan semakin tinggi pula peluang perusahaan dalam melakukan manajemen laba. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Romantis *et al* (2020) yang membuktikan perencanaan pajak

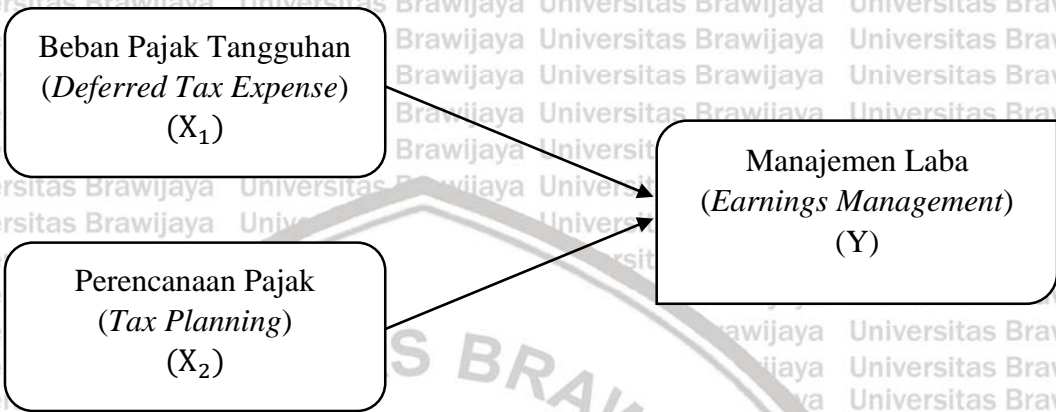
berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak ingin membayar pajak terlalu besar. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan lebih dominan melakukan *tax avoidance* sehingga semakin rendah perencanaan pajaknya, *tax avoidance* nya semakin besar sehingga meningkatkan probabilitas manajemen laba. Penelitian terdahulu yang membahas mengenai ini dilakukan oleh Sumomba & Hutomo (2012), Ulfah (2014), dan Meilany (2016) membuktikan bahwa perencanaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Berbeda halnya dengan peneliti lain, Aditama dan Purwaningsih (2014), serta Wardani & Santi (2018) yang menunjukkan hasil penelitiannya bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

H₂= Perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap probabilitas manajemen laba untuk menghindari kerugian.

2.3 Model Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka bagan rerangka teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Model Penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016-2018. Pengambilan periode waktu yang dipakai dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hasil yang akurat dan aktual sesuai dengan kondisi sekarang ini. Populasi dalam penelitian ini terdapat 154 perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di BEI pada periode 2016-2018 tersebut.

Peneliti memilih perusahaan nonmanufaktur sektor perdagangan, jasa dan investasi dengan alasan karena perusahaan pada sektor tersebut merupakan salah satu sektor yang memiliki skala besar dan memiliki peran yang cukup besar bagi perekonomian negara serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sektor ini saling berkaitan erat karena berhubungan dengan daya beli masyarakat, permintaan konsumen, kualitas pelayanan bagi masyarakat, dan minat para investor untuk melakukan investasi.

Pengambilan sampel yang akan digunakan adalah metode *purposive sampling*, yaitu teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu dengan tujuan data yang hendak diperoleh hasilnya lebih representatif (Sugiyono, 2016: 82). Berikut adalah kriteria-kriteria yang dipakai dalam penentuan sampel penelitian, antara lain:

1. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit dan berakhir pada 31 Desember dari tahun 2016-2018.
2. Perusahaan yang tidak mengalami delisting di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2016-2018.
3. Perusahaan yang mempunyai kelengkapan data (memenuhi kriteria variabel penelitian) selama tahun 2016-2018.
4. Perusahaan yang tidak melakukan akuisisi, merger, restrukturisasi dan perubahan kelompok usaha dari tahun 2016-2018 karena akan menimbulkan perbedaan terhadap laporan keuangan yang disajikan sehingga mempengaruhi posisi dan kinerja keuangan perusahaan.
5. Perusahaan yang melaporkan laporan keuangan dalam satuan mata uang rupiah (IDR) selama tahun 2016-2018.
6. Perusahaan yang melaporkan laba dengan nilai kecil (*small profit firms*) dengan nilai *Scaled Earning Change* dalam range 0 – 0,06 atau perusahaan yang melaporkan rugi dengan nilai kecil (*small loss firms*) dengan nilai *Scaled Earning Change* dalam -0,09 – 0.

3.2 Data Penelitian dan Sumbernya

3.2.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yaitu jenis data yang didapatkan secara tidak langsung melalui media perantara. Data tersebut secara tidak langsung diberikan kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016: 225). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dari setiap

perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di BEI periode tahun 2016-2018. Data perusahaan yang didapat berasal dari www.idx.co.id dan *Indonesia Capital Market Directory* (ICMD).

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder yang adalah laporan keuangan perusahaan perdagangan, jasa dan investasi yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia atau melalui akses internet www.bapepam.co.id dan www.idx.co.id serta informasi lebih lanjut dari *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD), juga dari buku dan sumber lainnya mengenai manajemen laba.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Sugiyono (2015:38) menjelaskan bahwa variabel penelitian merupakan segala sesuatu dengan bentuk apapun yang ditentukan oleh peneliti untuk dikaji sehingga dapat memperoleh informasi dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Untuk melakukan pengujian hipotesis yang diajukan oleh peneliti, variabel penelitian ini dikelompokkan menjadi variabel dependen (variabel terikat) dan variabel independen (variabel bebas). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba (Y), sementara variabel independen dalam penelitian ini adalah beban pajak tangguhan (X1) dan perencanaan pajak (X2).

3.3.1 Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Sugiyono (2015:39) menyatakan bahwa variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau variabel yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.

Dalam penelitian ini, variabel dependennya adalah manajemen laba (Y).

Manajemen laba adalah suatu upaya yang dilakukan manajemen dengan mengubah informasi (angka) mengenai laba menjadi naik atau turun dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan (Muid, 2005). Dari upaya manajemen laba ini, laporan keuangan perusahaan membuat laba yang dilaporkan menjadi tidak sesuai dengan nilai yang sebenarnya sehingga mengakibatkan asimetri informasi karena informasi yang diperoleh tidak lagi sesuai dengan kondisi sebenarnya dan perolehan informasi yang diterima antara pihak *stakeholders* dan manajemen menjadi tidak seimbang (Hairu, 2009). Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yulianti (2004) yang menyatakan probabilitas perusahaan dalam melakukan manajemen laba untuk menghindari pelaporan kerugian diperoleh dari pendistribusian manajemen laba berdasarkan *scaled earnings changes* (Phillips *et al.* 2003; Yulianti 2004).

Pengukuran variabel manajemen laba menggunakan skala nominal yaitu variabel *dummy*, data yang digunakan pada variabel *dummy* bersifat kategorikal.

Manajemen laba akan diberi nilai 1 (satu) pada saat perusahaan masuk ke dalam kategori *small profit firm* (pelaporan laba kecil) yang mengindikasikan bahwa perusahaan melakukan manajemen laba dan 0 (nol) pada saat perusahaan masuk ke dalam kategori *small loss firm* (pelaporan rugi kecil) yang mengindikasikan bahwa perusahaan tidak melakukan manajemen laba.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yulianti (2004) jika perusahaan berada pada *range* -0,09–0 maka perusahaan tersebut masuk ke dalam kelompok *small loss firm* yang mengindikasikan bahwa perusahaan tidak melakukan manajemen laba, sementara bagi perusahaan yang berada pada *range* 0 – 0,06 maka perusahaan tersebut masuk ke dalam kelompok *small profit firm* yang mengindikasikan bahwa perusahaan melakukan manajemen laba untuk menghindari kerugian. Model distribusi laba ini mengacu pada penelitian Yulianti (2004). Sementara itu, rumus untuk mendapatkan skala pengukuran variabel manajemen laba untuk menghindari kerugian adalah sebagai berikut:

$$\text{Scaled Earnings Change } i t = \frac{\text{Net Income } i t}{\text{Market Value of Equity } i (t - 1)}$$

Keterangan:

Dummy

Scaled earnings change $i t$ = distribusi laba

Net Income $i t$ = laba bersih perusahaan i pada tahun t

Market Value of Equity $i (t-1)$ = *Market value of Equity* perusahaan i pada tahun $t-1$ (menggunakan nilai kapitalisasi pasar).

Penghitungan nilai kapitalisasi yaitu jumlah saham beredar perusahaan i pada akhir tahun $t-1$ dikalikan dengan harga saham perusahaan i pada akhir tahun $t-1$.

3.3.2 Variabel Independen (Variabel Bebas)

Sugiyono (2016:39) menyatakan bahwa variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau sebagai penyebab timbulnya variabel dependen.

Dalam penelitian ini, variabel independen yang dipakai adalah:

3.3.2.1 Beban Pajak Tangguhan

Beban pajak tangguhan merupakan beban yang muncul karena adanya perbedaan yang bersifat temporer mengenai pengakuan dan perlakuan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal sehingga muncul perbedaan laba komersial dan laba fiskal. Berdasarkan penelitian oleh Phillips *et al* (2003), rumus penghitungan pajak tangguhan adalah:

$$\text{Deferred Tax Expenses} = \frac{\text{Deferred Tax Expenses}_i}{\text{Total Asset}_i (t-1)}$$

Keterangan:

Deferred Tax Expenses = *Deferred Tax Expenses* (Beban pajak tangguhan)

*Deferred Tax Expenses*_{i t} = Beban pajak tangguhan perusahaan i pada tahun t

*Total Asset*_{i (t-1)} = Total aset perusahaan i pada akhir tahun t-1

Penggunaan total aset yang disebabkan oleh beban pajak tangguhan terjadi karena perbedaan temporer yang membuat pengakuan biaya dan penghasilan berpindah yang semestinya tahun lalu menjadi tahun ini.

3.3.2.2 Perencanaan Pajak

Perencanaan Pajak (Tax Planning) adalah proses pengorganisasian usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya, berada dalam posisi

yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Zain, 2005:43)

Berdasarkan referensi dari penelitian Wild et al (2004), perencanaan pajak diukur dengan rumus *tax retention rate* (tingkat retensi pajak) yang mengukur tingkat efektivitas manajemen pajak pada suatu periode. Ukuran efektivitas manajemen pajak sama dengan ukuran efektivitas perencanaan pajak. Rumus tingkat retensi pajak adalah;

$$TRR = \frac{Net\ Income\ i\ t}{Pretax\ Income\ (EBT)\ i\ t}$$

Keterangan:

TRR = *Tax retention rate* (Tingkat retensi pajak)

Net Income i t = Laba bersih perusahaan i pada tahun t

Pretax Income (EBT) i t = Laba sebelum pajak perusahaan i pada tahun t

Jika TRR menunjukkan angka yang tinggi maka artinya perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan tinggi dan semakin efektif. Sedangkan hal sebaliknya terjadi jika TRR menunjukkan angka yang rendah yang berarti perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan tidak efektif.

3.4 Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan menggunakan metode statistik deskriptif. Penggunaan metode statistik deskriptif ini bertujuan untuk menyampaikan uraian atau deskripsi tentang variabel-variabel dalam penelitian.

Hipotesis diuji dengan memakai regresi logistik. Penggunaan regresi logistik ini bertujuan untuk menguji apakah variabel-variabel independen (beban pajak

tanggungan dan perencanaan pajak) memberikan pengaruh secara signifikan atau tidak dalam mengetahui praktik manajemen laba. Berikut merupakan pemaparan mengenai metode analisis data dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini:

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Penggunaan metode statistik deskriptif ini bertujuan untuk menyampaikan uraian atau deskripsi tentang variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini. Uji deskriptif yang dipakai, yaitu rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum dan minimum. Statistik deskriptif menampilkan bentuk berupa numerik (kuantitatif) yang sangat krusial bagi data sampel, sehingga dapat lebih mudah dipahami oleh pembaca secara kontekstual.

3.4.2 Analisis Regresi Logistik

Analisis regresi digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis. Regresi merupakan alat analisis yang dipakai untuk menghitung seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sementara itu, penggunaan metode analisis data adalah analisis regresi logistik. Pada penelitian ini, variabel dependen menggunakan variabel dummy yang bersifat kategorikal. Menurut Gani dan Amalia (2015: 196), variabel dependen pada regresi logistik menggunakan data kategorik serta variabel independen menggunakan data numeric dan/kategorik. Menurut Ghozali (2007: 9), pada penelitian yang variabel dependennya bersifat kategorikal maka regresi logistik cocok digunakan untuk penelitian.

Berikut adalah model regresi logistik yang digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis menurut Gani dan Amalia (2015: 196):

$$\ln \frac{EM}{1-EM} = \alpha + \beta_1 DTE_{it} + \beta_2 TRR_{it} + \varepsilon$$

Keterangan:

\ln = Variabel dummy

EM = *Earnings management* (Manajemen Laba)

Kode 1 : bagi perusahaan yang termasuk *small profit firm*

Kode 0 : bagi perusahaan yang termasuk *small loss firm*.

TRR_{it} = *Tax retention rate* (tingkat retensi pajak) perusahaan i pada tahun t

DTE_{it} = *Deferred tax expense* (beban pajak tangguhan) perusahaan i pada tahun t dibagi dengan total aset pada akhir tahun t-1

Dalam melakukan analisis pengujian model regresi logistik, terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu, tahapan-tahapan tersebut antara lain:

3.4.2.1 Uji Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test

Regresi logistik adalah regresi yang telah dimodifikasi sehingga sudah memiliki karakteristik yang berbeda dengan model regresi sederhana atau berganda. Tingkat signifikansi yang ditentukan juga memiliki perbedaan dengan regresi berganda. Penentuan tingkat signifikansi dalam regresi logistik yaitu dengan menggunakan kesesuaian model (*goodness of fit*), dilihat dari R² ataupun F test.

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menilai mengenai model yang dihipotesiskan supaya data empiris cocok dengan model. Hipotesis tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut:

H₀ = Model yang dihipotesiskan cocok dengan data.

H₁ = Model yang dihipotesiskan tidak cocok dengan data.

Pengambilan keputusan didasarkan pada hasil nilai signifikansi. H_0 diterima jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sebaliknya, H_0 ditolak jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

Ghozali (2011: 339) menjelaskan bahwa hipotesis nol (H_0) ditolak jika nilai *Hosmer and Lemeshow's goodness of fit test statistic* sama dengan atau kurang dari *fit test statistic* dengan nilai 0,05, yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga kesesuaian modelnya tidak baik karena model tidak mampu memperkirakan nilai observasinya. Maka dari itu, hipotesis nol (H_0) diterima jika nilai *Hosmer and Lemeshow's goodness of fit test statistic* lebih besar dari 0,05, yang berarti terdapat tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga dikatakan model cocok dengan data karena model mampu memperkirakan nilai observasinya.

3.4.2.2 Uji Kelayakan Keseluruhan Model

Penilaian keseluruhan model (*overall model fit*) menggunakan *Log Likelihood value* (nilai -2LogL), dilakukan dengan membandingkan antara nilai -2LogL awal (*block number* = 0), model ini memasukkan konstanta dengan nilai -2LogL . Bagian berikutnya, *block number* sama dengan 1 dan memasukkan konstanta serta variabel independen. Model ini dapat disimpulkan bahwa jika nilai -2LogL *block number* = 0 lebih besar dari nilai *block number* = 1, maka artinya model regresi baik. *Log likelihood* pada regresi logistik serupa dengan pengertian "Sum of Square Error" pada model regresi ini, menandakan penurunan nilai *Log likelihood*, berarti semakin baik model tersebut. Pengurangan nilai yang terdapat

antara -2LogL awal dan akhir menyatakan bahwa model yang dihipotesiskan cocok dengan data (Ghozali, 2011: 338).

3.4.2.3 Koefisien Determinasi (Nagelkerke's R^2)

Ghozali (2011: 339) menjelaskan bahwa penggunaan koefisien determinasi ditujukan untuk menilai tingkat kemampuan model dalam menguraikan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi pada regresi logistik dapat dilihat dari nilai nagelkerke R square. Nagelkerke R square dapat diinterpretasikan seperti nilai R square pada regresi berganda. Nilai *Nagelkerke R square* digunakan dalam penelitian ini. Jika nilai *Nagelkerke R square* hampir mendekati angka satu (1), maka artinya variabel-variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memperkirakan tingkat variasi variabel dependen. Nilai *Nagelkerke R square* yang rendah mengindikasikan bahwa variabel-variabel independen memiliki kemampuan yang sangat terbatas dalam menguraikan variabel dependen.

3.4.2.4 Uji Multikolinearitas

Penggunaan uji multikolinearitas ditujukan untuk menguji tingkat korelasi antar variabel independen yang ditemukan dalam suatu model regresi. Uji multikolinearitas ini hanya dipakai pada penelitian yang mempunyai variabel independen lebih dari satu. Indikasi model regresi yang baik adalah jika antar variabel independen tidak terjadi korelasi. Untuk mengetahui apakah terdapat multikolinearitas dalam model regresi logistik, maka dapat dilihat dari nilai

koefisien korelasi antara variabel independen. Nilai koefisien korelasi dapat diketahui pada persilangan antar variabel independen. Jika nilai koefisien korelasi kurang 0,8, maka nilai tersebut menunjukkan bahwa tidak terdeteksi gejala multikolinearitas dan uji regresi logistik bisa dilanjutkan (Gujarati, 2010: 428).

3.4.2.5 Uji Tabel Klasifikasi

Ghozali (2011: 339) mengemukakan bahwa tabel klasifikasi 2 X 2 adalah tabel yang dipakai untuk mengukur nilai estimasi yang tepat (*correct*) dan salah (*incorrect*). Dari tabel klasifikasi dapat diketahui kekuatan prediksi dari model regresi untuk memperkirakan variabel dependen. Kolom menunjukkan dua nilai prediksi dari variabel dependen, sementara itu baris memperlihatkan nilai observasi sebenarnya dari variabel dependen. Pada model yang sempurna menunjukkan bahwa semua kasus berada pada diagonal dengan tingkat ketepatan peramalan sebesar 100%.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016-2018 yang menunjukkan terdapat 124 perusahaan yang bergerak di sektor perdagangan, jasa dan investasi terdaftar di BEI. Dalam penelitian ini akan dilakukan seleksi kembali sampel-sampel yang digunakan sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan menggunakan metode *purposive sampling*. Pada tabel 4.1 berikut merupakan proses penentuan sampel penelitian:

Tabel 4.1
Hasil Seleksi Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
Perusahaan perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2018	124
Perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan yang diaudit dan tidak mempublikasikan laporan keuangannya secara lengkap	(3)
Perusahaan yang mengalami <i>delisting</i>	(0)
Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian	(10)
Perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan dalam satuan mata uang Rupiah	(9)
Perusahaan yang melakukan merger, akuisisi, restrukturisasi, dan perubahan kelompok usaha	(2)
Perusahaan yang termasuk <i>small profit firms</i> dan <i>small loss firms</i> dengan nilai <i>Scaled Earning Change</i> dalam range 0 – 0,06 dan - 0,09 - 0	(69)
Total Perusahaan yang Dijadikan Sampel Penelitian	33
Tahun Penelitian (2016-2018)	3
Total Sampel Penelitian selama 3 tahun	99
Data yang tidak memenuhi syarat untuk diuji	(4)
Jumlah data observasi	95

Sumber: www.idx.co.id dan Indonesia Capital Market Directory, data diolah, 2020

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah perusahaan perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di BEI dari tahun 2016-2018 tercatat sebanyak 124 perusahaan. Ada 3 perusahaan perdagangan, jasa dan investasi yang tidak melaporkan laporan keuangan yang diaudit dan/atau tidak mempublikasikan laporan keuangannya secara lengkap selama tahun 2016-2018. Perusahaan perdagangan, jasa dan investasi yang tercatat tidak menggunakan satuan mata uang Rupiah (IDR) atau menggunakan satuan mata uang asing adalah sebanyak 8 perusahaan. Kemudian, terdapat 9 perusahaan perdagangan, jasa dan investasi yang tidak memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan untuk penelitian selama tahun 2016-2018. Perusahaan perdagangan, jasa dan investasi yang melakukan merger, akuisisi, restrukturisasi, dan perubahan kelompok usaha selama tahun 2016-2018 tercatat 2 perusahaan yang melakukan hal tersebut. Kriteria terakhir, perusahaan perdagangan, jasa dan investasi yang tidak memiliki nilai *Scaled Earning Change* dalam range 0 – 0,06 dan -0,09 – 0 selama tahun penelitian 2016-2018 adalah sebanyak 69 perusahaan. Maka, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 33 perusahaan digunakan sebagai sampel penelitian serta jumlah observasi yang dilakukan selama tahun 2016-2018 adalah sebanyak 99 data observasi. Sementara itu, sejumlah 4 data observasi ditemukan tidak memenuhi syarat untuk diuji, maka dari itu terjadi pengurangan sebesar 4 sampel penelitian sehingga sampel penelitian yang akan diteliti pada penelitian adalah sebanyak 95 data observasi.

4.2. Statistik Deskriptif

Ghozali (2011: 19) mengemukakan bahwa statistik menunjukkan gambaran atau menjelaskan suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), maksimum, minimum, dan standar deviasi. Hasil analisis statistik deskriptif dibagi menjadi dua kelompok yakni kelompok *small loss firms* dan kelompok *small profit firms* dari variabel-variabel dalam penelitian ini, yaitu beban pajak tangguhan, perencanaan pajak, dan manajemen laba ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Hasil Analisis Statistik Deskriptif – *Small Loss Firms*

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DTE	30	-0,01429	0,15043	0,00707	0,031959
TRR	30	0,76449	2,468	1,13835	0,351955
EM	30	-0,06753	-0,00033	-0.03281	0,016198
Valid N (listwise)	30				

Sumber: Data diolah SPSS 25, 2020

Tabel 4.2 di atas mendeskripsikan statistik deskriptif bagi kelompok perusahaan *small loss firms* dari variabel yang terdapat dalam penelitian ini, di antaranya nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi.

Berdasarkan tabel 4.2, hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif dijelaskan sebagai berikut:

- a. Hasil analisis statistik deskriptif terhadap beban pajak tangguhan (*deferred tax expense* – DTE) menunjukkan nilai minimum sebesar -0,0143. Artinya, PT MNC Sky Vision (MSKY) pada tahun 2018 memiliki nilai beban pajak

tanggungan paling rendah yaitu sebesar -0,0143 jika dibandingkan dengan total aset perusahaan tahun sebelumnya (2017). Hal ini menunjukkan perusahaan memiliki manfaat pajak tanggungan terbesar bagi kelompok *small loss firms*. Nilai maksimum atau nilai beban pajak tanggungan terbesar bagi kelompok *small loss firms* dimiliki oleh PT Trikonsel Oke (TRIO) pada tahun 2017 yaitu sebesar 0,15 jika dibandingkan dengan total aset tahun sebelumnya (2016). Rata-rata beban pajak tanggungan perusahaan perdagangan, jasa dan investasi bagi kelompok *small loss firms* dalam observasi memiliki nilai sebesar -0,000707, artinya perusahaan-perusahaan perdagangan, jasa dan investasi yang termasuk kelompok *small loss firms* lebih banyak yang memiliki beban pajak tanggungan dibandingkan dengan manfaat pajak tanggungan. Maka dari itu, beban pajak tanggungan cenderung banyak digunakan oleh perusahaan perdagangan, jasa dan manufaktur bagi kelompok *small loss firms* dibandingkan *small profit firms* selama tahun 2016-2018 untuk melakukan praktik manajemen laba. Nilai standar deviasi untuk variabel beban pajak tanggungan hanya sebesar 3,19% yang menunjukkan variabilitas data observasi relative kecil.

- b. Hasil analisis statistik deskriptif terhadap perencanaan pajak (*tax retention rate* – TRR) bagi kelompok *small loss firms* menunjukkan nilai minimum sebesar 0,7645 yang dimiliki oleh PT MNC Sky Vision (MSKY) pada tahun 2018. Artinya, PT MNC Sky Vision (MSKY) pada tahun 2018 memiliki nilai laba bersih lebih besar daripada nilai laba sebelum pajak dengan rasio paling rendah jika dibandingkan perusahaan lain pada kelompok *small loss firms*. Nilai maksimum atau nilai perencanaan pajak terbesar dimiliki oleh PT MNC Sky

Vision (MSKY) pada tahun 2017 yaitu sebesar 2,468, artinya nilai laba bersih perusahaan sebesar 246 persen lebih besar daripada nilai laba sebelum pajak perusahaan pada tahun 2017. Rata-rata perencanaan pajak perusahaan perdagangan, jasa dan investasi kelompok *small loss firms* dalam observasi memiliki nilai sebesar 1,138, artinya perusahaan-perusahaan perdagangan, jasa dan investasi yang termasuk *small loss firms* memiliki rata-rata laba bersih lebih tinggi 113,8 persen dibandingkan dengan rata-rata laba sebelum pajak selama tahun 2016-2018. Maka dari itu, perencanaan pajak telah dilakukan secara efektif oleh rata-rata perusahaan perdagangan, jasa dan investasi selama periode 2016-2018. Nilai standar deviasi menunjukkan persentase sebesar 35,2% yang berarti variabilitas data observasi untuk variabel perencanaan pajak lebih besar dibandingkan variabel beban pajak tangguhan.

- c. Hasil analisis statistik deskriptif terhadap manajemen laba (*earning management* – EM) bagi kelompok *small loss firms* menunjukkan nilai minimum sebesar -0,0675 oleh PT Bintang Mitra Semestara (BMSR) pada tahun 2016. Sedangkan nilai maksimum dimiliki oleh PT Trikonsel Oke (TRIO) pada tahun 2018 sebesar -0,00033. Nilai rata-rata manajemen laba bagi kelompok *small loss firms* menunjukkan angka -0,0328. Nilai standar deviasi untuk manajemen laba yaitu sebesar 0,01619 yang menunjukkan distribusi variabilitas sebesar 1,62% dalam data.

Tabel 4.3
Hasil Analisis Statistik Deskriptif – *Small Profit Firms*

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DTE	65	-0,01071	0,0423	-0,0000989	0,007483
TRR	65	0,14863	1,96433	0,7520466	0,25365
EM	65	0,00003	0,05818	0,0229734	0,01747

Valid N (listwise)

65

Sumber: Data diolah SPSS 25, 2020

Tabel 4.3 di atas mendeskripsikan statistik deskriptif bagi kelompok perusahaan *small loss firms* dari variabel yang terdapat dalam penelitian ini, di antaranya nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi.

Berdasarkan tabel 4.3, hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif dijelaskan sebagai berikut:

- a. Hasil analisis statistik deskriptif terhadap beban pajak tangguhan (*deferred tax expense* – DTE) menunjukkan nilai minimum sebesar -0,0107. Artinya, PT Inter Delta Tbk (INTD) pada tahun 2018 memiliki nilai beban pajak tangguhan paling rendah yaitu sebesar -0,0107 jika dibandingkan dengan total aset perusahaan tahun sebelumnya (2017). Hal ini menunjukkan perusahaan memiliki manfaat pajak tangguhan terbesar bagi kelompok *small loss firms*. Nilai maksimum atau nilai beban pajak tangguhan terbesar bagi kelompok *small profit firms* dimiliki oleh PT Pembangunan Graha Lestari Inda (PGLI) pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,0423 jika dibandingkan dengan total aset tahun sebelumnya (2017). Rata-rata beban pajak tangguhan perusahaan perdagangan, jasa dan investasi dalam observasi memiliki nilai sebesar -0,00009, artinya perusahaan-perusahaan perdagangan, jasa dan investasi yang termasuk kelompok *small profit firms* lebih banyak yang memiliki manfaat pajak tangguhan dibandingkan dengan beban pajak tangguhan. Maka dari itu, beban pajak tangguhan tidak banyak digunakan oleh perusahaan perdagangan, jasa dan manufaktur bagi kelompok *small profit firms* selama tahun 2016-2018

untuk melakukan praktik manajemen laba. Nilai standar deviasi untuk variabel beban pajak tangguhan hanya sebesar 0,75% yang menunjukkan variabilitas data observasi kecil.

- b. Hasil analisis statistik deskriptif terhadap perencanaan pajak (*tax retention rate* – TRR) bagi kelompok *small profit firms* menunjukkan nilai minimum sebesar 0,1486 yang dimiliki oleh PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR) pada tahun 2016. Artinya, PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR) pada tahun 2016 memiliki nilai laba bersih lebih besar daripada nilai laba sebelum pajak dengan rasio paling rendah jika dibandingkan perusahaan lain pada kelompok *small profit firms*. Nilai maksimum atau nilai perencanaan pajak terbesar dimiliki oleh PT Bukit Uluwatu Villa (BUVA) pada tahun 2016 yaitu sebesar 1,964, artinya nilai laba bersih perusahaan sebesar 196 persen lebih besar daripada nilai laba sebelum pajak perusahaan pada tahun 2017. Rata-rata perencanaan pajak perusahaan perdagangan, jasa dan investasi kelompok *small profit firms* dalam observasi memiliki nilai sebesar 0,752, artinya perusahaan-perusahaan perdagangan, jasa dan investasi yang termasuk *small profit firms* memiliki rata-rata laba bersih lebih tinggi 75,2 persen dibandingkan dengan rata-rata laba sebelum pajak selama tahun 2016-2018. Maka dari itu, perencanaan pajak telah dilakukan secara efektif oleh rata-rata perusahaan perdagangan, jasa dan investasi selama periode 2016-2018. Nilai standar deviasi menunjukkan persentase sebesar 25,36% yang berarti variabilitas data observasi untuk variabel perencanaan pajak lebih besar dibandingkan variabel beban pajak tangguhan.

c. Hasil analisis statistik deskriptif terhadap manajemen laba (*earning management* – EM) bagi kelompok *small profit firms* menunjukkan nilai minimum sebesar 0,00003 oleh PT AKR Corporindo (AKRA) pada tahun 2018. Sedangkan nilai maksimum dimiliki oleh PT Anabatic Technologies (ATIC) pada tahun 2017 sebesar 0,05818. Nilai rata-rata manajemen laba bagi kelompok *small profit firms* menunjukkan angka 0,02297. Nilai standar deviasi untuk manajemen laba yaitu sebesar 0,01747 yang menunjukkan distribusi variabilitas sebesar 1,75% dalam data.

4.3 Uji Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test

Hosmer and Lemeshow's goodness of fit test digunakan untuk menilai kelayakan model regresi. Ghazali (2011: 339) menyebutkan bahwa model dapat diterima jika nilai statistik *Hosmer and Lemeshow's goodness of fit test* menunjukkan angka lebih besar dari 0,05 yang berarti model mampu memprediksi nilai observasinya karena model fit dengan data observasinya. Berikut adalah hasil uji *Hosmer and Lemeshow's of fit test* pada perusahaan perdagangan, jasa dan investasi selama tahun 2016-2018:

Tabel 4.4
Hasil Uji *Hosmer and Lemeshow*

Step	Chi-square	df	Sig.
1	7,482	8	0,486

Sumber: Data diolah SPSS 25, 2020

Tabel 4.4 di atas menunjukkan nilai khi-kuadrat dari *Hosmer and Lemeshow's of fit test* sebesar 7,482 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,486,

nilai *Chi-square* tabel untuk DF 8 dengan taraf signifikansi 0,05 senilai 15,507, maka nilai *chi-square Hosmer and Lemeshow's* lebih kecil dari nilai *chi-square* tabel (7,482 < 15,507) dengan kemungkinan $0,486 > 0,05$ ($p > 0,05$). Artinya, model dapat diterima karena fit dengan data observasinya karena nilai probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis dianggap mampu memprediksi nilai observasinya.

4.4 Uji kelayakan Keseluruhan Model

Ghozali (2011: 338) berpendapat bahwa pada saat nilai *-2Log Likelihood* pada awal (*block number* = 0) sebelum variabel bebas dimasukkan ke dalam model dengan *-2Log Likelihood* pada akhir (*block number* = 1) setelah kedua variabel bebas dimasukkan ke dalam model mengalami penurunan atau pengurangan nilai, maka menunjukkan bahwa model hipotesis fit atau cocok dengan data. Dalam model regresi, *Log Likelihood* sama dengan *Sum of Square Error* sehingga penurunan nilai yang terjadi menggambarkan model regresi semakin baik. Tabel di bawah menunjukkan hasil pengujian kelayakan keseluruhan model:

Tabel 4.5
Tabel Uji *Overall Model Fit*
(Block number = 0)

Iteration		-2Log likelihood	Coefficients Constant
Step 0	1	118,522	0,737
	2	118,494	0,773
	3	118,494	0,773

Sumber: Data diolah SPSS 25, 2020

Tabel 4.6
Tabel Uji Overall Model Fit
(Block number = 1)

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients		
			Constant	DTE	TRR
Step 1	1	90,452	3,258	-6,137	-2,869
	2	84,240	5,270	-6,162	-5,018
	3	83,405	6,342	-5,969	-6,172
	4	83,389	6,520	-5,962	-6,360
	5	83,389	6,524	-5,962	-6,364
	6	83,389	6,524	-5,962	-6,364

Sumber: Data diolah SPSS 25, 2020

Tabel 4.7
Tabel Uji Overall Model Fit

Perbandingan -2LogL awal dengan -2LogL akhir

-2LogL awal (block number = 0)	118,494
-2LogL akhir (block number = 1)	83,389

Sumber: Data diolah SPSS 25, 2020

Pada perbandingan tabel 4.7 di atas menunjukkan penurunan nilai antara -2LogL pada awal (block number = 0) sebelum variabel bebas dimasukkan ke dalam model yaitu bernilai 118,494 dengan -2LogL pada akhir (block number = 1) setelah kedua variabel bebas yaitu beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak dimasukkan ke dalam model dengan nilai 83,389. Adanya penurunan nilai antara -2LogL awal sebesar 118,494 dan -2LogL akhir sebesar 83,389 memperlihatkan bahwa model regresi bagus atau model hipotesis fit dengan data.

4.5 Uji Koefisien Determinasi (Nagelkerke's R²)

Koefisien determinasi digunakan untuk menilai seberapa jauh suatu model mampu menjelaskan variasi variabel terikat. Koefisien determinasi memiliki nilai

antara nol (0) sampai dengan satu (1). Semakin besar nilai *Nagelkerke R Square* mendekati angka satu maka menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas memberikan semakin besar informasi yang diperlukan untuk meramal variasi variabel dependen. Sebaliknya, semakin kecil nilai *Nagelkerke R square* atau semakin mendekati angka nol maka variabel-variabel bebas memiliki kemampuan yang terbatas dalam menjelaskan variabel terikat (Ghozali, 2011: 339).

Tabel 4.8
Koefisien Determinasi

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	83,389	0,309	0,433

Sumber: Data diolah SPSS 25, 2020

Tabel 4.8 menunjukkan hasil dari koefisien determinasi. Jumlah nilai koefisien determinasi dalam model regresi logistik biner pada perusahaan perdagangan, jasa dan investasi selama tahun penelitian diketahui pada nilai *Nagelkerke's R Square* sebesar 0,433 atau 43,3% yang menunjukkan bahwa variabel beban pajak tangguhan dan variabel perencanaan pajak dapat menjelaskan atau mempengaruhi variabel manajemen laba sebesar 43,3%. Sedangkan sisanya sebanyak 56,7% variabel terikat atau variabel manajemen laba dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini. Nilai 0,433 mengungkapkan adanya korelasi yang cukup kuat antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

4.6 Uji Multikolinearitas

Tujuan dari pengujian multikolinearitas menurut Ghozali (2011: 105) adalah untuk melakukan uji apakah suatu model regresi memiliki korelasi antar variabel independen. Dalam model regresi logistik, ada tidaknya multikolinearitas dapat ditemukan atau dideteksi pada nilai koefisien korelasi antar variabel independen. Nilai koefisien tersebut dapat diketahui dari persilangan antar variabel independen pada tabel matriks korelasi 4.6 di bawah. Jika nilai koefisien korelasi kurang dari 0,8 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan gejala multikolinearitas antar variabel independen. Berikut adalah hasil uji multikolinearitas:

Tabel 4.9
Matriks Korelasi

		Constant	DTE	TRR
Step 1	Constant	1,000	0,165	-0,982
	DTE	-0,165	1,000	-0,171
	TRR	-0,982	-0,171	1,000

Sumber: Data diolah SPSS 25, 2020

Dari tabel 4.9 di atas dapat dilihat bahwa dari hasil *correlation matrix* dalam persilangan antar variabel independen yaitu beban pajak tangguhan (DTE) dan perencanaan pajak (TRR) memperlihatkan nilai koefisien korelasi sebesar -0,171. Hasil ini menunjukkan bahwa antar variabel memiliki korelasi negatif atau memiliki arah yang berlawanan. Artinya, setiap kenaikan beban pajak tangguhan, perencanaan pajak akan mengalami penurunan. Nilai koefisien korelasi sebesar -0,171 atau 0,171 lebih kecil dari 0,8 dan dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan

gejala multikolinearitas antar variabel independen, yaitu beban pajak tanggungan dan perencanaan pajak.

4.7 Uji Tabel Klasifikasi

Tabel klasifikasi digunakan untuk menjelaskan mengenai gambaran atas prediksi model regresi dengan data observasi yang ditunjukkan berdasarkan tabel klasifikasi 2 X 2 yang menghitung nilai estimasi yang benar dan salah. Tabel klasifikasi berupa tabel tabulasi silang antara prediksi model regresi logistik dan hasil observasi. Ghozali (2011: 339) menyebutkan bahwa pada model yang sempurna, semua kasus akan berada pada diagonal dengan tingkat ketepatan peramalan 100%. Tabulasi silang berguna untuk mengkonfirmasi bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara prediksi model regresi logistik dengan data observasi yang dapat diketahui pada tabel berikut:

Tabel 4.10
Hasil Tabel Klasifikasi

Observed		Predicted		Percentage Correct
		EM		
		Small Loss Firm	Small Profit Firm	
Step 1	EM	14	16	46,7
		6	59	90,8
Overall Percentage				76,8

Sumber: Data diolah SPSS 25, 2020

Tabel 4.10 di atas menunjukkan kekuatan model regresi atau kekuatan ramalan probabilitas perusahaan perdagangan, jasa dan investasi selama tahun 2016-2018 untuk menerapkan praktek manajemen laba adalah sebesar 90,8%. Hal tersebut menunjukkan pada model regresi bahwa sebanyak 59 observasi diprediksi melakukan praktik manajemen laba dari 65 observasi perusahaan yang melakukan

manajemen laba. Sedangkan, kekuatan model regresi dalam meramal probabilitas perusahaan perdagangan, jasa dan investasi selama tahun 2016-2018 tidak menerapkan praktek manajemen laba adalah sebesar 46,7%. Dari total 30 observasi yang tidak melakukan manajemen laba, prediksi menyebutkan terdapat 14 data observasi yang benar-benar tidak melakukan praktek manajemen laba. Penelitian ini menunjukkan keseluruhan kekuatan model regresi adalah sebesar 76,8% yang berarti ketepatan model penelitian adalah sebesar 76,8%.

4.8 Hasil Uji Regresi Logistik

Penelitian ini menggunakan model regresi logistik guna mengetahui pengaruh dari variabel independen yaitu beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap variabel dependen yaitu manajemen laba. Pengujian hipotesis pada regresi ini dilihat dengan membandingkan nilai kemungkinan (sig.), jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak atau H_1 diterima, sehingga kesimpulannya variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima atau H_1 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Berikut adalah hasil uji koefisien regresi logistik:

Tabel 4.11
Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik

		B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)
Step 1	DTE	-5,962	23,423	0,065	1	0,799	0,003
	TRR	-6,364	1,563	16,579	1	0,000	0,002
	Constant	6,524	1,456	20,078	1	0,000	680,963

Sumber: Data diolah SPSS 25, 2020

Output uji koefisien regresi logistik atau persamaan model regresi logistik yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$\ln \frac{EM}{1-EM} = 6,524 - 5,962 DTEi - 6,364 TRRi + \varepsilon$$

Persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

1) Nilai konstanta beban pajak tangguhan (*deferred tax expense* – DTE) dan perencanaan pajak (*tax retention rate*– TRR) adalah 6,524, artinya perusahaan-perusahaan cenderung melakukan manajemen laba (*earning management* – EM) sebesar 6,524.

2) Nilai koefisien regresi variabel beban pajak tangguhan (*deferred tax expense* – DTE) memiliki nilai negatif sebesar 5,962 dan signifikansi sebesar 0,799 atau lebih besar dari taraf signifikansi alpha 0,05. Artinya, beban pajak tangguhan memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba atau dapat dikatakan setiap peningkatan beban pajak tangguhan, maka cenderung tidak mempengaruhi perusahaan untuk menerapkan praktek manajemen laba. Nilai signifikansi yang menunjukkan angka 0,799 yakni lebih besar dari 0,05 menyimpulkan bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap praktek manajemen laba.

3) Nilai koefisien regresi variabel perencanaan pajak (*tax retention rate*– TRR) menunjukkan nilai negatif sebesar 6,364 dan signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari taraf signifikansi alpha 0,05. Artinya, perencanaan pajak memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba atau dapat dikatakan semakin peningkatan perencanaan pajak maka kecenderungan perusahaan

melakukan manajemen laba semakin rendah. Nilai signifikansi yang menunjukkan angka 0,000 yakni lebih kecil 0,05 dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap praktek manajemen laba.

4.9 Pembahasan

4.9.1 Hubungan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba

Phillips *et.al* (2003) dalam penelitian yang dilakukannya menemukan hubungan antara beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba. Phillips berpendapat bahwa beban pajak tangguhan dapat digunakan untuk mengukur pilihan *discretionary* manajer dengan baik dan bahwa praktik manajemen laba dapat menimbulkan perbedaan pencatatan pajak. Menurut Phillips terdapat bukti empiris bahwa beban pajak tangguhan dapat memberikan penjelasan tambahan kepada *accrual* dalam menjelaskan manajemen laba yang diterapkan perusahaan. Maka dari itu, hubungan ini disebabkan karena beban pajak tangguhan digunakan untuk meramalkan terjadinya praktik manajemen laba oleh manajemen.

Beban pajak diukur dengan menggunakan indikator pembobot beban pajak tangguhan dengan total aset pada periode $t-1$ (Yulianti, 2005). Penggunaan total asset disebabkan beban pajak tangguhan terjadi karena adanya perbedaan waktu (perbedaan temporer) yang menyebabkan biaya dan penghasilan tahun lalu baru diketahui tahun ini. Dari hasil uji regresi logistik yang ditunjukkan pada Tabel 4.10 dapat dilihat variabel beban pajak tangguhan (DTE — deferred tax expense) memiliki pengaruh negatif dengan nilai koefisien regresi -5,962 dan nilai signifikansi 0,799. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga H_1 ditolak maka

dapat disimpulkan bahwa beban pajak tangguhan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Beban pajak tangguhan menunjukkan hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba untuk menghindari kerugian kemungkinan dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, adanya keterbatasan manajemen dalam mempengaruhi akun beban pajak tangguhan, karena beban pajak tangguhan diatur dalam akuntansi komersial dan akuntansi pajak. Keterbatasan tersebut disebabkan oleh karena adanya pengaturan penghitungan pajak dalam peraturan fiskal yang bersifat lebih ketat dibandingkan dengan laporan keuangan komersial. Kedua, dari adanya peraturan perpajakan yang ketat mengenai penghitungan pajak, besaran beban pajak tangguhan yang digunakan untuk mengubah laba pada laporan laba rugi fiskal akan terkoreksi dalam laporan laba rugi fiskal karena penghitungan pajaknya hanya mengakui besaran penghasilan atau biaya pada saat periode tersebut sebagai dasar penghitungan laba rugi fiskal yang membuat beban pajak tangguhan tidak diakui. Hal ini berarti bahwa beban pajak tangguhan perusahaan perdagangan, jasa dan investasi selama tahun 2016-2018 mendeteksi bahwa manajemen laba melalui beban pajak tangguhan tidak efektif karena beban pajak tangguhan tidak mampu mencerminkan bahwa perusahaan tersebut melakukan manajemen laba.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hamzah (2009), Subagyo (2011) dan Fitriany (2016) yang juga menyatakan bahwa beban pajak tangguhan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Sumomba (2012) yang

menyatakan bahwa beban pajak tangguhan mempengaruhi manajemen laba secara signifikan.

4.9.2 Hubungan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba

Hubungan antara perencanaan pajak terhadap manajemen laba dapat dijelaskan secara konseptual dalam teori keagenan dan teori akuntansi positif.

Dalam teori keagenan, dalam hal ini pemerintah (*fiscus*) merupakan pihak prinsipal dan manajemen merupakan pihak agen yang masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda dalam pembayaran pajak. Perusahaan (agen) berupaya untuk membayar pajak dalam jumlah yang sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti meminimalisir kemampuan ekonomis perusahaan. Dalam pihak lainnya, pemerintah (prinsipal) memerlukan pemasukkan dana yang berasal dari penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Maka dari itu, terjadi perbedaan kepentingan yang terjadi antara perusahaan dengan pemerintah, yaitu pemerintah sangat membutuhkan penerimaan pajak sedangkan agen berusaha supaya pajak yang dibayarkan kepada pemerintah dengan jumlah minimum.

Perencanaan pajak dilakukan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien. Cara yang dilakukan dalam perencanaan pajak adalah mencari berbagai celah (*loopholes*) agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal. Perusahaan menginginkan kenaikan laba untuk motivasi tertentu tetapi di sisi lain menginginkan pembayaran pajak serendah mungkin sehingga kondisi ini dapat disebut sebagai efisiensi pembayaran pajak. Terlebih dalam penelitian ini manajemen laba ditujukan untuk menghindari kerugian. Teori akuntansi positif yang berkaitan *the bonus plan hypothesis*. Bonus atau *reward* menjadi motivasi

manajemen sehingga menginginkan kenaikan laba tanpa diiringi kenaikan beban pajak atau menginginkan penghematan pajak sehingga pajak yang dibayarkan menjadi minimum. Dengan menaikkan laba akuntansi sehingga kondisi keuangan perusahaan dalam posisi laba, memungkinkan manajer untuk mendapatkan bonus atau *reward* namun dengan tetap membayar pajak dengan jumlah minimum. Dengan ini, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan lebih karena tidak perlu mengeluarkan *cost* melalui pajak yang lebih besar serta mencapai tujuan perusahaan untuk tetap meningkatkan laba guna menghindari pelaporan kerugian.

Variable perencanaan pajak dihitung dengan menggunakan rumus tingkat retensi pajak (*Tax Retention Rate*), dengan menganalisis suatu ukuran dari efektivitas manajemen pajak laporan keuangan perusahaan tahun berjalan (Wild *et al.*, 2004). Dari hasil uji regresi logistik yang ditunjukkan pada Tabel 4.11 dapat dilihat bahwa koefisien regresi untuk variable perencanaan pajak (*TRR – Tax Retention Rate*) adalah -6,364 dengan nilai signifikan 0,000. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 sehingga H_2 diterima dan dapat disimpulkan bahwa variabel perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal itu berarti setiap kenaikan perencanaan pajak maka praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan semakin menurun.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba dengan arah atau hubungan yang negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin rendah perencanaan pajak, akan semakin tinggi *tax avoidance* nya sehingga semakin besar praktik manajemen laba yang dilakukan. Perusahaan melakukan perencanaan pajak melalui *tax avoidance* yaitu

upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya, perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21. Hal ini disebabkan karena perusahaan tidak ingin membayar pajak yang terlalu besar namun di sisi lain perusahaan ingin menaikkan labanya karena masih mengalami kerugian. Dengan kata lain, perusahaan melakukan manajemen laba melalui perencanaan pajak dengan tujuan untuk menghindari pembayaran beban pajak yang tinggi atau untuk meminimalkan beban pajak penghasilan pada saat kondisi laba akuntansi naik untuk menghindari kerugian sehingga perusahaan hanya membayar pajak dengan nominal yang rendah yang menunjukkan perencanaan pajak yang efektif. Selain itu perusahaan juga memiliki keuntungan untuk menarik minat investor sehingga memperoleh tambahan modal dari investor melalui pembelian saham.

Hasil penelitian ini mendukung dengan penelitian dari Sumomba (2012) dan Fitriany (2016) yang menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aditama dan Purwaningsih (2014) serta Wardani dan Santi (2018) yang membuktikan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh beban pajak tangguhan dan perencanaan pada terhadap manajemen laba di 33 perusahaan perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mulai tahun 2016-2018 dengan menggunakan alat analisis regresi logistik. Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengukur manajemen laba yaitu beban pajak tangguhan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kecenderungan perusahaan perdagangan, jasa dan investasi melalui praktik manajemen laba. Sementara itu, perencanaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecenderungan perusahaan perdagangan, jasa dan investasi melalui praktik manajemen laba.

Beban pajak tangguhan dalam penelitian ini tidak dapat mendeteksi manajemen laba dapat disebabkan oleh dua hal. Pertama, adanya keterbatasan manajemen dalam mempengaruhi akun beban pajak tangguhan, karena beban pajak tangguhan diatur dalam akuntansi komersial dan akuntansi pajak. Keterbatasan tersebut disebabkan oleh karena adanya pengaturan penghitungan pajak dalam peraturan fiskal yang bersifat lebih ketat dibandingkan dengan laporan keuangan komersial. Kedua, dari adanya peraturan perpajakan yang ketat mengenai penghitungan pajak, besaran beban pajak tangguhan yang digunakan untuk mengubah laba pada laporan laba rugi fiskal akan terkoreksi dalam laporan laba rugi fiskal karena penghitungan pajaknya hanya mengakui besaran penghasilan atau

biaya pada saat periode tersebut sebagai dasar penghitungan laba rugi fiskal yang membuat beban pajak tangguhan tidak diakui.

Perencanaan pajak dalam penelitian ini memiliki pengaruh negatif terhadap probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba untuk menghindari kerugian.

Hal ini mengindikasikan bahwa semakin kecil perencanaan pajak, maka semakin besar *tax avoidance* nya sehingga semakin besar praktik manajemen laba.

Perencanaan pajak ini dilakukan dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan

dengan melakukan upaya efisiensi pajak dengan menghindari menghindari

pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak (*tax*

avoidance) oleh perusahaan. Penelitian ini menguji manajemen laba yang

ditujukan untuk menghindari kerugian sehingga pada kondisi ini perusahaan

menginginkan kenaikan laba pada laporan keuangan komersial namun dengan tetap

membayar pajak dengan jumlah minimum. Dari hasil penelitian ini dapat

disimpulkan bahwa perusahaan mencapai efisiensi beban pajak. Maka dari itu,

dapat disimpulkan bahwa perusahaan perdagangan, jasa dan investasi yang

terdaftar di BEI tahun 2016-2018 lebih menginginkan kenaikan laba untuk tujuan

menghindari kerugian namun dengan pembayaran pajak minimum, hal ini sesuai

dengan teori akuntansi positif yaitu *the bonus plan hypothesis*. Bonus atau *reward*

menjadi motivasi manajemen sehingga menginginkan kenaikan laba tanpa diiringi

kenaikan beban pajak atau menginginkan penghematan pajak sehingga pajak yang

dibayarkan menjadi minimum. Dengan menaikkan laba akuntansi sehingga kondisi

keuangan perusahaan dalam posisi laba, memungkinkan manajer untuk

mendapatkan bonus atau *reward* namun dengan tetap membayar pajak dengan

jumlah minimum. Dengan ini, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan

lebih karena tidak perlu mengeluarkan *cost* melalui pajak yang lebih besar serta mencapai tujuan perusahaan untuk tetap meningkatkan laba guna menghindari pelaporan kerugian.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini disadari bahwa terdapat beberapa keterbatasan yang menjadi kekurangan dan kelemahan dalam penelitian ini. Keterbatasan-keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini antara lain:

1. Pengukuran variabel independen perencanaan pajak dan variabel dependen manajemen laba yang diukur dengan *dummy* menggunakan unsur yang sama yaitu *net income* sehingga hasil penelitian yang menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba maka memungkinkan terjadinya bias pengukuran. Hasil yang berpengaruh dapat disebabkan karena kedua variabel memiliki unsur kemiripan dan dianggap memiliki korelasi yang kuat sehingga memiliki potensi bias.
2. Variabel dependen dianggap berpotensi masih memiliki bias karena model distribusi laba yang digunakan masih mengacu pada data lama yaitu perusahaan yang terdaftar di BEJ tahun 1999-2002 yang belum tentu mencerminkan kondisi pada masa ini dan pada model distribusi laba ini menganggap semua perusahaan pada kelompok *small profit* (pelaporan laba kecil) dan *small increase* (peningkatan laba kecil) melakukan usaha manajemen laba.
3. Peneliti menemui kesulitan dalam menemukan beberapa laporan keuangan serta informasi terkait status perusahaan perdagangan, jasa dan manufaktur

yang tidak tersedia di Bursa Efek Indonesia sehingga beberapa perusahaan yang laporan keuangannya tidak tersedia dan informasi yang rancu di Bursa Efek Indonesia tidak dapat dimasukkan ke dalam sampel penelitian yang menyebabkan tidak dapat menggambarkan perusahaan perdagangan, jasa dan manufaktur secara representatif.

5.3 Saran untuk Penelitian Berikutnya

Berdasarkan kekurangan dan keterbatasan penelitian ini, maka disarankan untuk penelitian berikutnya:

1. Penggunaan model distribusi laba dalam pengukuran manajemen laba perlu dilakukan penyempurnaan model karena model lama masih mengacu pada data BEJ tahun 1999-2002 yang dianggap sudah usang dan mungkin sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini karena sudah terjadi banyak perubahan dari berbagai faktor. Penyempurnaan model dapat dilakukan dengan menguji kembali penggunaan distribusi laba dalam mendeteksi manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar di BEI pada periode terbaru dengan rentang waktu yang lebih lama untuk meningkatkan validitas hasil penelitian.
2. Pada penelitian selanjutnya perlu dilakukan identifikasi lebih detail mengenai faktor-faktor yang dipakai untuk menguji model terbaik yang dapat digunakan sebagai pengukur manajemen laba. Hal ini dapat disesuaikan dengan tujuan manajemen laba tertentu yang hendak diteliti dalam penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Aditama, Ferry dan Anna Purwaningsih. 2014. *Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Non Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. MODUS Vol. 26. No 1. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Agus Pramuka, Bambang dan Ujijanto. 2007. *Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Perusahaan*. Simposium Nasional Akuntansi.

Anthony, R., and Vijay Govindarajan. 2005. *Management Control System*, Jilid I dan II, Terjemahan Kurniawan Tjakrawala dan Krista. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Arfani, Astri Nur Kusumawati dan Noer Sasongko. 2005. *Analisis Perbedaan Pengaturan Laba (Earnings Management) pada Kondisi Laba dan Rugi pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 4 No. 1.

CNBC Indonesia. 2019. *Kinerja Pajak 2018, Lagi-Lagi Tak Capai Target*. www.cnbcindonesia.com (Diakses pada tanggal 11 Mei 2020).

CNN Indonesia. 2019. *Menyoal Laba BUMN yang Mendadak Kinclong*. www.cnnindonesia.com (Diakses pada tanggal 12 Desember 2020).

Deviana, Bergita dan Kiswara, Endang. 2010. *Kemampuan Beban Pajak Tangguhan Dan Beban Pajak Kini Dalam Deteksi Manajemen Laba Pada Saat Seasoned Equity Offerings*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.

Dewi, L. S., & Ulupui, I. K. (2014). *Pengaruh Pajak Penghasilan dan Asset Perusahaan pada Earnings Management*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 8.1, 250-259.

Dul Muid, dan Nanang, Catur. 2005. *Pengaruh Manajemen Laba terhadap Reaksi Pasar dan Risiko Investasi pada Perusahaan Publik di Bursa Efek Jakarta*. Jurnal Akuntansi dan Auditing (JAA), Vol. 1, No. 1: pp. 139-161.

Eisenhard. 2004. *Does Financial Disclosure Influence the Value Relevance of Accounting Information?* Education Business and Society. Comtemporary Middle Eastern Issues. Vol. 6 No. ¾ Pg. 216-243. Emerald Group Publishing Limited.

Ettredge, Michael L., et al. 2008. *Is Earnings Fraud Associated with High Deferred Tax and/or Book Minus Tax Levels*. Auditing: Journal of Practice and Theory Vol. 27 (1) Hal 1-33.

Fitriany, L. C. 2016. *Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2013)*. JOM Fekom Vol. 3 No. 1. Universitas Riau.

Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gani, Irwan dan Amalia, Siti. 2015. *Alat Analisis Data: Aplikasi Statistik untuk Penelitian Bidang Ekonomi dan Sosial*. Yogyakarta: PT. Andi Offset.

Hairu, Ningsih. 2009. *Hubungan antara Manajemen Laba, Good Corporate Governance, dan Struktur Pengendalian Intern terhadap Perencanaan Audit*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Ekonomi UTIRA-IBEK.

Halim, Julia, Carmel Meiden dan Rudolf Lumban Tobing. 2005. *Pengaruh Manajemen Laba pada Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Termasuk dalam Indeks LQ-45*. Simposium Nasional. Akuntansi VIII, Solo. Kemenkeu RI 2017.

Hamzah, Ardi. 2009. *Deteksi Earnings Management melalui Beban Pajak Tangguhan, Akrua, dan Arus Kas Operasi: Studi Pada Perusahaan Real Estate dan Property yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006-2008*. Departemen Akuntansi Universitas Trunojoyo.

Hanafi, Mamduh M. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Keempat. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Healy, P., dan Wahlen J. 1999. *A Review of The Earnings Management Literature and Its Implications for Standard Setting*. Accounting Horizon 12 (4).

Holland, D., and Alan Ramsay. 2003. *Do Australian Companies manage earnings to meet simple earnings benchmarks?* Accounting and Finance, vol 43, pp. 41 – 62.

Irreza, dan Yulianti. 2012. *Penggunaan Komponen Pembentu Pajak Tangguhan dalam Mendeteksi Manajemen Laba*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol 9. No. 1.

Januarti, Indira. 2004. *Pendekatan dan Kritik Teori Akuntansi Positif*. Jurnal Akuntansi dan Auditing (JAA), Volume 1 (Nomor 1). pp. 83-94.

Jayanti, Sules, Sodik, M., dan Hartini. 2020. *Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada*

Perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018).
Journal of Public and Business Accounting, Vol. 1 (1).

Jensen, Michael C., and Clifford H. Smith Jr. 1984. *The Modern Theory of Corporate Finance*. McGraw-Hill.

Jensen, Michael C., dan William H. Meckling. 1976. *Theory of The Firm: Managerial Behavior; Agency Costs, and Ownership Structure*. *The Journal of Financial Economics*.

Lumbantoruan, Sophar. 1994. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Negara, A.A Gede Raka Plasa dan I.D.G. Dharma Saputra. 2017. *Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol 20 No 3.

Novita, Ratih Emilia. 2017. *Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak (Tax Planning) atas Pajak Penghasilan Badan terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Perdagangan Jasa dan Investasi yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2015)*. Skripsi. Padang: Universitas Andalas.

Philips, John, Pimcus, Morton and Rego, Sonja Olhof. 2003. *Earnings Management: New Evidence Based on Defferred Tax Expense*. *The Accounting Review* Vol. 27 pp. 491-521.

Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

PSAK No. 46 Pajak Penghasilan. 2010. *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Ikatan Akuntan Indonesia.

Rini, F. A., dan Asrori. 2014. *Pengaruh Pajak Tangguhan dan Tax to Book Ratio terhadap Rating Sukuk*. *Accounting Analysis Journal* Vol. 3 No. 2 Hal: 211-219.

Schipper, Katherine. 1989. *Commentary Katherine on Earnings Management*. *Accounting Horizons*.

Mills, Lillian F. and Kaye J. Newberry. 2001. *The Influence of Tax and Non-Tax Costs on Book-Tax Reporting Differences: Public and Private Firms*. *Journal of American Taxation Association*, Vol.23, No. 1, pp. 1-19.

Prihatiningsih, Tyan Panca Ayu. 2019. *Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017)*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.

Romantis, Oma, Heriansyah, Kurnia, D.W., Soemarsono, dan Azizah, Widyarningsih. 2020. *Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba yang dimoderasi oleh penurunan tarif pajak (diskon pajak)*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen Universitas Pancasila, Vol. 16, No. 1

Scott, William R. 2003. *Financial Accounting Theory – Third Edition*. New Jersey: Prentice Hall International, Inc.

Setiawati, Lilis. 2001. *Rekayasa Akrual untuk Meminimalkan Pajak*. Simposium Nasional Akuntansi V. Semarang, 2001.

Sibarani, T., J., Hidayat, N., dan Surtikanti. (2015). *Analisis Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Discretionary Accruals, dan Arus Kas Operasi terhadap Manajemen Laba*. Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan, 2(1), 19–31. <https://doi.org/10.1029/2004TC001767>

Suandy, Early. 2011. *Perencanaan Pajak (Edisi Kelima)*. Jakarta: Salemba Empat.

Subagyo, Oktavia dan Mariana. 2011. *Pengaruh Discretionary Accrual dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba*. Jurnal Akuntansi, Vol. 11, No. 1.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sulistyanto, H. Sri. 2008. *Manajemen Laba, Teori, dan Model Empiris*. Jakarta: Grasindo.

Sumomba, Christina R dan YB. Sigit Hutomo. 2012. *Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba*. Kinerja Journal of Business and Economics Vol. 16 No. 2.

Suranggane, Zulaikha. (2007). *Analisis Aktiva Pajak Tangguhan dan Akrual Sebagai Prediktor Manajemen Laba: Kajian Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEJ*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 4 (1), 77-94.

Ujiyanto, Muh Arief. 2004. *Asimetri Informasi dan Manajemen Laba. Suatu Tinjauan dalam Hubungan Keagenan*. Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.

Ulfah, Yana. 2014. *Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak terhadap Praktik Manajemen Laba*. Universitas Mulawarman Samarinda. Prosiding Simposium Perpajakan 4.

Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Wardani, D. K. dan D. K. Santi. 2018. *Pengaruh Tax Planning, Ukuran Perusahaan, Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Manajemen Laba*. Jurnal Akuntansi Vol. 6. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.

Watts, Ross L. and Jerold L. Zimmerman. 1986. *Positive Accounting Theory*. USA: Prentice-Hall.

Yulianti. 2004. *Penggunaan Distribusi Laba dalam Mendeteksi Manajemen Laba*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 1 (2), 89-104.

_____. 2005. *Kemampuan Beban Pajak Tangguhan dalam Mendeteksi Manajemen Laba*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol. 2 No. 1: pp. 107-129.

Widyaningsih, A. dan C.A. Purnamawati. 2012. *Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba*. Prosiding Seminar Nasional Forum Bisnis dan Keuangan

Wild, John J., K. R. Subramanyam and Robert F. Hasley. 2004. *Financial Statement Analysis, 8th ed*. Boston: McGraw-Hill.

Zain, Mohammad. 2005. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat, Edisi Kedua.

_____. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat, Edisi Ketiga.

LAMPIRAN

Lampiran I

Daftar Sampel Perusahaan Perdagangan, Jasa dan Investasi Tahun 2016-2018

No	Nama Perusahaan	KODE
1	AKR Corporindo Tbk	AKRA
2	Bintang Mitra Semestara Tbk	BMSR
3	Dua Putra Utama Makmur Tbk	DPUM
4	Inter Delta Tbk	INTD
5	Tira Austenite Tbk	TIRA
6	Ace Hardware Indonesia Tbk	ACES
7	Sumber Alfaria Trijaya Tbk	AMRT
8	Electronic City Indonesia Tbk	ECII
9	Kokoh Inti Arebama Tbk	KOIN
10	Matahari Department Store Tbk	LPPF
11	Mitra Komunikasi Nusantara Tbk	MKNT
12	Trikonsel Oke Tbk	TRIO
13	Anugerah Kagum Karya Utama Tbk	AKKU
14	Bukit Uluwatu Villa Tbk	BUVA
15	Saraswati Griya Lestari Tbk	HOTL
16	Indonesian Paradise Property Tbk	INPP
17	Panorama Sentrawisata Tbk	PANR
18	Pembangunan Graha Lestari Inda Tbk	PGLI
19	Pudjiadi & Sons Tbk	PNSE
20	Red Planet Indonesia Tbk	PSKT
21	Pioneerindo Gourmet International Tbk	PTSP
22	Hotel Sahid Jaya International Tbk	SHID
23	Elang Mahkota Teknologi Tbk	EMTK
24	MNC Sky Vision Tbk	MSKY
25	Surya Citra Media Tbk	SCMA
26	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	MIKA
27	Sarana Meditama Metropolitan Tbk	SAME
28	Siloam International Hospitals Tbk	SILO
29	Sejahteraya Anugrahjaya Tbk	SRAJ
30	Anabatic Technologies Tbk	ATIC
31	Indoritel Makmur Internasional Tbk	DNET
32	Polaris Investama Tbk	PLAS
33	Pool Advista Indonesia Tbk	POOL

Lampiran I
Hasil Perhitungan *Deferred Tax Expense* (DTE)

No.	Nama	Kode	Beban Pajak Tangguhan				Total Aset			DTE		
			2016	2017	2018	2015	2016	2017	2016	2017	2018	
1	AKR Corporindo Tbk	AKRA	112.365.289	32.395.648	25.747.383	15.203.129.563	15.830.740.710	16.823.208.531	- 0,00739	- 0,00205	0,00153	
2	Bintang Mitra Semestaraya Tbk	BMSR	206.646.892	246.965.749	216.752.660	530.132.144.270	498.511.916.189	505.111.733.824	- 0,00039	- 0,00050	- 0,00043	
3	Dua Putra Utama Makmur Tbk	DPUM	19.156.664	1.126.124.128	1.001.273.897	1.575.467.891.720	1.688.051.817.768	2.079.476.367.995	- 0,00001	- 0,00067	- 0,00048	
4	Inter Delta Tbk	INTD	47.093.761	26.695.795	532.840.269	47.676.255.943	46.760.927.085	49.746.327.705	- 0,00099	0,00057	- 0,01071	
5	Tira Austenite Tbk	TIRA	434.529.556	837.327.740	342.316.337	216.779.431.128	239.673.729.905	341.749.270.708	- 0,00200	- 0,00349	- 0,00100	
6	Ace Hardware Indonesia Tbk	ACES	10.907.457.117	18.712.473.938	10.978.107.688	3.267.549.674.003	3.731.101.667.891	4.428.840.550.479	- 0,00334	- 0,00502	- 0,00248	
7	Sumber Alfaria Trijaya Tbk	AMRT	34.359.000.000	34.889.000.000	57.084.000.000	15.195.887.000.000	19.474.367.000.000	21.901.740.000.000	0,00226	- 0,00179	- 0,00261	
8	Electronic City Indonesia Tbk	ECII	1.471.136.500	2.004.494.500	2.243.390.000	1.898.418.873.433	1.881.645.933.066	1.899.930.632.192	- 0,00077	- 0,00107	- 0,00118	
9	Kokoh Inti Arebama Tbk	KOIN	303.135.095	1.673.198.515	603.445.219	688.936.581.313	708.069.212.062	743.789.368.008	- 0,00044	- 0,00236	- 0,00081	
10	Matahari Department Store Tbk	LPPF	4.148.000.000	10.052.000.000	9.348.000.000	4.868.878.000.000	3.889.291.000.000	5.427.426.000.000	0,00085	0,00258	- 0,00172	
11	Mitra Komunikasi Nusantara Tbk	MKNT	19.519.217	1.002.578.929	1.044.007.008	136.591.915.013	157.848.592.051	966.128.268.255	- 0,00014	- 0,00635	- 0,00108	
12	Trikonsel Oke Tbk	TRIO	68.932.665.772	64.688.093.518	3.779.611.834	805.355.872.058	430.032.185.417	267.494.791.082	0,08559	0,15043	0,01413	
13	Anugerah Kagum Karya Utama Tbk	AKKU	13.229.298	619.931.373	27.553.073	3.196.260.114	621.627.117.594	676.120.232.800	- 0,00414	0,00100	- 0,00004	
14	Bukit Uluwatu Villa Tbk	BUVA	12.451.359.883	22.382.363	2.654.575.220	2.563.343.153.139	2.972.885.482.438	3.284.333.367.539	- 0,00486	0,00001	0,00081	
15	Saraswati Griya Lestari Tbk	HOTL	587.784.758	880.369.996	930.034.111	953.082.197.775	1.063.831.105.712	1.090.352.699.626	0,00062	- 0,00083	- 0,00085	
16	Indonesian Paradise Property Tbk	INPP	14.547.816.498	30.720.806.408	6.517.468.383	4.901.062.529.658	5.155.753.396.983	6.667.921.476.644	- 0,00297	- 0,00596	0,00098	
17	Panorama Sentrawisata Tbk	PANR	5.626.497.000	2.020.726.000	11.910.670.000	1.745.981.217.000	2.279.403.845.000	2.649.578.530.000	- 0,00322	0,00089	- 0,00450	
18	Pembangunan Graha Lestari Inda Tbk	PGLI	24.568.907	947.109.734	3.423.632.033	65.103.319.418	68.325.896.841	80.931.406.341	- 0,00038	0,01386	0,04230	
19	Pudjadi & Sons Tbk	PNSE	951.734.198	863.452.180	409.639.558	432.109.728.581	501.235.506.230	507.861.064.122	0,00220	- 0,00172	0,00081	
20	Red Planet Indonesia Tbk	PSKT	72.459.168	237.264.629	760.217.992	524.726.818.434	628.196.929.018	485.983.039.090	- 0,00014	- 0,00038	- 0,00156	

**Lampiran II
(Lanjutan)**

No.	Nama	Kode	Beban Pajak Tangguhan			Total Aset			DTE		
			2016	2017	2018	2015	2016	2017	2016	2017	2018
21	Pioneerindo Gourmet International Tbk	PTSP	1.165.845.000	1.134.238.000	2.647.172.000	288.118.597.000	289.989.643.000	306.085.119.000	0,00405	0,00391	0,00865
22	Hotel Sahid Jaya International Tbk	SHID	- 1.253.226.530	- 357.082.302	- 211.201.718	1.449.036.770.639	1.443.540.346.013	1.518.623.166.828	- 0,00086	- 0,00025	- 0,00014
23	Elang Mahkota Teknologi Tbk	EMTK	- 80.223.583.000	- 88.388.780.000	- 175.852.591.000	17.500.271.744.000	20.376.367.838.000	22.209.662.128.000	- 0,00458	- 0,00434	- 0,00792
24	MNC Sky Vision Tbk	MSKY	- 57.199.000.000	111.883.000.000	- 70.693.000.000	5.692.606.000.000	5.348.524.000.000	4.947.388.000.000	- 0,01005	0,02092	- 0,01429
25	Surya Citra Media Tbk	SCMA	- 11.171.480.000	- 23.757.895.000	- 29.864.951.000	4.565.963.576.000	4.820.611.941.000	5.385.807.878.000	- 0,00245	- 0,00493	- 0,00555
26	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	MIKA	- 14.461.175.180	- 8.203.441.619	- 11.467.617.896	3.719.815.820.449	4.176.188.101.672	4.712.039.481.525	- 0,00389	- 0,00196	- 0,00243
27	Sarana Meditama Metropolitan Tbk	SAME	- 11.385.388.384	- 4.059.626.052	- 8.911.818.292	1.203.219.993.917	1.451.906.798.116	1.714.734.766.230	- 0,00946	- 0,00280	- 0,00520
28	Siloam International Hospitals Tbk	SILO	- 9.425.000.000	- 10.525.000.000	- 5.534.000.000	2.986.270.000.000	4.215.689.000.000	7.596.268.000.000	- 0,00316	- 0,00250	- 0,00073
29	Sejahterajaya Anugrahjaya Tbk	SRAJ	- 16.052.214.162	1.201.460.881	- 1.377.654.792	1.671.945.400.584	2.303.567.501.432	2.155.945.656.421	- 0,00960	0,00052	- 0,00064
30	Anabatic Technologies Tbk	ATIC	- 3.270.968.205	- 3.952.816.278	- 881.025.984	2.279.590.703.070	2.660.040.152.796	3.258.019.612.783	- 0,00143	- 0,00149	- 0,00027
31	Indoritel Makmur Internasional Tbk	DNET	- 484.495.347	- 6.678.552.954	- 228.238.316	7.928.528.692.506	8.335.065.215.434	10.899.944.883.176	- 0,00006	- 0,00080	0,00002
32	Polaris Investama Tbk	PLAS	- 463.750.711	652.998.360	1.533.133	342.172.856.548	353.501.590.539	359.860.260.941	- 0,00136	0,00185	0,00000
33	Pool Advista Indonesia Tbk	POOL	4.670.595.130	6.187.024.568	359.496.111	171.148.834.597	610.583.675.049	909.158.621.060	0,02729	0,01013	- 0,00040

Lampiran II

Net Income dan Hasil Perhitungan *Tax Retention Rate* (TRR)

No.	Nama	Kode	Laba Bersih			Laba Sebelum Pajak			TRR		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	AKR Corporindo Tbk	AKRA	1.046.852.086	1.001.314.446	663.340.794	1.156.166.690	1.156.229.638	890.156.150	0,90545	0,86602	0,74520
2	Bintang Mitra Semestaraya Tbk	BMSR	19.569.224.683	3.097.905.406	5.556.962.755	19.635.644.575	2.947.093.405	6.227.364.095	0,99662	1,05117	0,89235
3	Dua Putra Utama Makmur Tbk	DPUM	90.940.950.633	105.548.625.881	8.486.766.111	119.100.703.969	139.394.987.503	11.721.043.714	0,76356	0,75719	0,72406
4	Inter Delta Tbk	INTD	1.226.300.267	1.680.588.246	1.729.634.987	1.854.980.256	2.622.348.041	2.755.865.468	0,66109	0,64087	0,62762
5	Tira Austenite Tbk	TIRA	1.111.674.690	10.764.777.724	396.735.126	1.525.402.988	11.259.807.057	2.447.319.004	0,72877	0,95604	0,16211
6	Ace Hardware Indonesia Tbk	ACES	706.150.082.276	780.686.814.661	976.273.356.597	863.127.561.485	959.980.347.383	1.202.709.103.365	0,81813	0,81323	0,81173
7	Sumber Alfaria Trijaya Tbk	AMRT	553.835.000.000	257.735.000.000	668.426.000.000	747.546.000.000	381.342.000.000	867.131.000.000	0,74087	0,67586	0,77085
8	Electronic City Indonesia Tbk	ECH	32.270.199.731	9.801.947.790	21.825.792.298	33.741.336.231	11.806.442.290	19.582.402.298	0,95640	0,83022	1,11456
9	Kokoh Inti Arebama Tbk	KOIN	6.699.824	14.597.991.710	9.993.012.908	130.368.081	7.244.550.782	8.325.461.068	0,05139	2,01503	1,20030
10	Matahari Department Store Tbk	LPPF	2.019.705.000.000	1.907.077.000.000	1.097.332.000.000	2.532.666.000.000	2.396.300.000.000	1.575.321.000.000	0,79746	0,79584	0,69658
11	Mitra Komunikasi Nusantara Tbk	MKNT	2.297.528.116	37.374.914.360	1.426.324.779	3.413.803.149	50.729.386.181	9.823.131.713	0,67301	0,73675	0,14520
12	Trikonsel Oke Tbk	TRIO	504.992.012.209	189.940.195.572	17.088.974.878	434.721.028.687	124.815.870.429	12.273.399.044	1,16165	1,52176	1,39236
13	Anugerah Kagum Karya Utama Tbk	AKKU	4.927.346.390	19.453.731.339	9.638.897.778	4.940.575.688	18.833.799.966	9.666.450.851	0,99732	1,03292	0,99715
14	Bukit Uluwatu Villa Tbk	BUVA	12.683.120.556	39.112.510.912	13.854.741.330	6.456.703.521	38.667.939.384	22.016.316.254	1,96433	1,01150	0,62929
15	Saraswati Griya Lestari Tbk	HOTL	13.919.014.091	13.435.576.495	11.154.831.905	12.441.176.083	12.780.924.935	11.735.188.629	1,11879	1,05122	0,95055
16	Indonesian Paradise Property Tbk	INPP	181.566.742.860	147.427.151.843	122.894.269.254	167.018.926.362	116.705.245.435	129.860.412.347	1,08710	1,26324	0,94636
17	Panorama Sentrawisata Tbk	PANR	2.905.942.000	36.090.327.000	25.036.800.000	19.551.202.000	60.912.276.000	18.812.759.000	0,14863	0,59250	1,33084
18	Pembangunan Graha Lestari Inda Tbk	PGLI	622.803.096	1.476.782.162	4.300.000.687	856.548.407	2.511.981.319	7.723.632.720	0,72711	0,58790	0,55673
19	Pudjadi & Sons Tbk	PNSE	655.081.613	27.728.693.128	10.060.854.778	2.739.531.464	29.116.026.166	7.361.578.252	0,23912	0,95235	1,36667
20	Red Planet Indonesia Tbk	PSKT	53.321.337.904	33.311.151.481	20.166.643.731	53.368.028.051	33.214.675.150	20.926.861.723	0,99913	1,00290	0,96367

**Lampiran III
(Lanjutan)**

No.	Nama	Kode	Laba Bersih			Laba Sebelum Pajak			TRR		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
21	Pioneerindo Gourmet International Tbk	PTSP	4.509.517.000	10.245.713.000	19.726.369.000	8.937.064.000	14.659.621.000	28.405.767.000	0,50459	0,69891	0,69445
22	Hotel Sahid Jaya International Tbk	SHID	763.198.004	1.458.068.918	1.716.844.066	1.044.276.545	2.725.449.247	2.144.847.568	0,73084	0,53498	0,80045
23	Elang Mahkota Teknologi Tbk	EMTK	892.885.880.000	447.944.371.000	- 2.305.536.736.000	1.355.487.662.000	868.002.157.000	- 1.937.720.507.000	0,65872	0,51606	1,18982
24	MNC Sky Vision Tbk	MSKY	- 197.442.000.000	- 289.337.000.000	- 228.114.000.000	- 254.557.000.000	- 117.223.000.000	- 298.389.000.000	0,77563	2,46826	0,76449
25	Surya Citra Media Tbk	SCMA	1.513.628.912.000	1.317.748.064.000	1.475.042.200.000	2.023.551.865.000	1.782.043.501.000	1.969.018.654.000	0,74801	0,73946	0,74913
26	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	MIKA	720.721.429.886	708.761.732.542	658.737.307.293	896.309.622.206	877.154.672.813	850.147.997.720	0,80410	0,80802	0,77485
27	Sarana Meditama Metropolitan Tbk	SAME	14.795.337.338	72.015.135.309	58.883.226.709	27.212.875.954	96.608.031.757	81.698.901.417	0,54369	0,74544	0,72073
28	Siloam International Hospitals Tbk	SILO	98.701.000.000	103.521.000.000	26.393.000.000	172.293.000.000	200.039.000.000	161.156.000.000	0,57287	0,51750	0,16377
29	Sejahteraya Anugerahjaya Tbk	SRAJ	- 97.506.908.717	- 101.281.094.785	- 95.600.579.196	- 113.559.122.879	- 100.079.633.904	- 96.978.233.988	0,85864	1,01201	0,98579
30	Anabatic Technologies Tbk	ATIC	73.214.143.692	79.089.339.791	68.659.723.049	105.911.180.179	114.440.768.495	115.368.993.610	0,69128	0,69109	0,59513
31	Indoritel Makmur Internasional Tbk	DNET	398.072.946.858	170.793.416.762	282.868.126.051	400.861.610.016	164.461.447.372	286.072.851.383	0,99304	1,03850	0,98880
32	Polaris Investama Tbk	PLAS	- 19.430.491.620	- 13.924.172.611	413.213.440	19.027.933.313	12.523.588.207	1.384.349.368	1,02116	1,11184	0,29849
33	Pool Advista Indonesia Tbk	POOL	18.571.826.625	224.980.802.445	60.865.054.994	55.419.146.778	236.896.886.133	- 54.264.658.240	0,33512	0,94970	1,12163

Lampiran III
Hasil Perhitungan *Market Value of Equity*

No.	Nama	Kode	Harga Saham			Jumlah lembar saham yang beredar			MV t-1		
			2015	2016	2017	2015	2016	2017	2016	2017	2018
1	AKR Corporindo Tbk	AKRA	7.175	6.000	6.350	3.949.030.235	3.991.781.170	4.006.329.420	28.334.291.936.125	23.950.687.020.000	25.440.191.817.000
2	Bintang Mitra Semestaraya Tbk	BMSR	250	145	140	1.159.200.024	1.159.200.024	1.159.200.024	289.800.006.000	168.084.003.480	162.288.003.360
3	Dua Putra Utama Makmur Tbk	DPUM	990	655	278	4.175.000.000	4.175.000.000	4.175.000.000	4.133.250.000.000	2.734.625.000.000	1.160.650.000.000
4	Inter Delta Tbk	INTD	380	650	450	118.365.600	118.365.600	591.828.000	44.978.928.000	76.937.640.000	266.322.600.000
5	Tira Austenite Tbk	TIRA	1.420	330	260	58.800.000	588.000.000	588.000.000	83.496.000.000	194.040.000.000	152.880.000.000
6	Ace Hardware Indonesia Tbk	ACES	825	835	1.155	17.150.000.000	17.150.000.000	17.150.000.000	14.148.750.000.000	14.320.250.000.000	19.808.250.000.000
7	Sumber Alfaria Trijaya Tbk	AMRT	580	625	610	38.614.252.900	41.524.501.700	41.524.501.700	22.396.266.682.000	25.952.813.562.500	25.329.946.037.000
8	Electronic City Indonesia Tbk	ECII	850	600	605	1.334.333.000	1.334.333.000	1.334.333.000	1.134.183.050.000	800.599.800.000	807.271.465.000
9	Kokoh Inti Arebama Tbk	KOIN	290	300	298	980.843.732	980.843.732	980.843.732	284.444.682.280	294.253.119.600	292.291.432.136
10	Matahari Department Store Tbk	LPPF	17.600	15.125	10.000	2.917.918.080	2.917.918.080	2.917.918.080	51.355.358.208.000	44.133.510.960.000	29.179.180.800.000
11	Mitra Komunikasi Nusantara Tbk	MKNT	510	540	262	1.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	510.000.000.000	2.700.000.000.000	1.310.000.000.000
12	Trikonsel Oke Tbk	TRIO	2.000	2.000	2.000	4.761.500.000	4.761.500.000	26.007.494.645	9.523.000.000.000	9.523.000.000.000	52.014.989.290.000
13	Anugerah Kagum Karya Utama Tbk	AKKU	300	74	54	253.000.000	6.449.463.636	6.449.463.636	75.900.000.000	477.260.309.064	348.271.036.344
14	Bukit Uluwatu Villa Tbk	BUVA	595	570	520	3.096.031.500	3.405.634.600	3.405.634.600	1.842.138.742.500	1.941.211.722.000	1.770.929.992.000
15	Saraswati Griya Lestari Tbk	HOTL	133	127	95	3.550.000.250	3.550.000.250	3.550.001.452	472.150.033.250	450.850.031.750	337.250.137.940
16	Indonesian Paradise Property Tbk	INPP	358	565	650	11.181.971.732	11.181.971.732	11.181.971.732	4.003.145.880.056	6.317.814.028.580	7.268.281.625.800
17	Panorama Sentrawisata Tbk	PANR	450	625	550	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	540.000.000.000	750.000.000.000	660.000.000.000
18	Pembangunan Graha Lestari Inda Tbk	PGLI	69	57	155	488.000.000	488.000.000	488.000.000	33.672.000.000	27.816.000.000	75.640.000.000
19	Pudjiadi & Sons Tbk	PNSE	409	900	1.250	797.813.496	797.813.496	797.813.496	326.305.719.864	718.032.146.400	997.266.870.000
20	Red Planet Indonesia Tbk	PSKT	895	735	50	1.353.092.800	1.362.761.027	10.351.231.636	1.211.018.056.000	1.001.629.354.845	517.561.581.800

**Lampiran IV
(Lanjutan)**

No.	Nama	Kode	Harga Saham			Jumlah lembar saham yang beredar			MV t-1		
			2015	2016	2017	2015	2016	2017	2016	2017	2018
21	Pioneerindo Gourmet International Tbk	PTSP	8.500	7.300	7.200	220.808.000	220.808.000	220.808.000	1.876.868.000.000	1.611.898.400.000	1.589.817.600.000
22	Hotel Sahid Jaya International Tbk	SHID	545	895	1.550	1.119.326.168	1.119.326.168	1.119.326.168	610.032.761.560	1.001.796.920.360	1.734.955.560.400
23	Elang Mahkota Teknologi Tbk	EMTK	10.300	9.975	9.500	5.640.032.442	5.640.032.442	5.640.032.442	58.092.334.152.600	56.259.323.608.950	53.580.308.199.000
24	MNC Sky Vision Tbk	MSKY	1.335	1.045	780	7.063.886.000	7.770.274.600	9.065.320.366	9.430.287.810.000	8.119.936.957.000	7.070.949.885.480
25	Surya Citra Media Tbk	SCMA	3.100	2.800	2.480	14.621.601.234	14.621.601.234	14.621.601.234	45.326.963.825.400	40.940.483.455.200	36.261.571.060.320
26	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	MIKA	2.400	2.570	1.810	14.550.736.000	14.550.736.000	14.550.736.000	34.921.766.400.000	37.395.391.520.000	26.336.832.160.000
27	Sarana Meditama Metropolitan Tbk	SAME	2.650	2.800	570	1.180.000.000	1.180.000.000	5.900.000.000	3.127.000.000.000	3.304.000.000.000	3.363.000.000.000
28	Siloam International Hospitals Tbk	SILO	9.800	10.900	9.575	1.156.100.000	1.300.612.500	1.625.765.625	11.329.780.000.000	14.176.676.250.000	15.566.705.859.375
29	Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk	SRAJ	370	244	242	8.030.483.593	10.917.783.981	10.917.783.981	2.971.278.929.410	2.663.939.291.364	2.642.103.723.402
30	Anabatic Technologies Tbk	ATIC	715	725	890	1.875.000.000	1.875.010.000	1.875.010.000	1.340.625.000.000	1.359.382.250.000	1.668.758.900.000
31	Indoritel Makmur Internasional Tbk	DNET	1.145	1.100	2.250	14.184.000.000	14.184.000.000	14.184.000.000	16.240.680.000.000	15.602.400.000.000	31.914.000.000.000
32	Polaris Investama Tbk	PLAS	1.570	406	50	1.184.200.000	1.184.200.000	1.184.200.000	1.859.194.000.000	480.785.200.000	59.210.000.000
33	Pool Advista Indonesia Tbk	POOL	2.990	2.180	4.050	224.994.004	1.799.952.032	2.250.168.464	672.732.071.960	3.923.895.429.760	9.113.182.279.200

Lampiran IV

Hasil Perhitungan *Scaled Earnings Change*

No.	Nama	Kode	Net Income (Eit)			Market Value of Equity (MV t-1)			Scaled Earnings Change		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	AKR Corporindo Tbk	AKRA	1.046.852.086	1.001.314.446	663.340.794	28.334.291.936.125	23.950.687.020.000	25.440.191.817.000	0,00004	0,00004	0,00003
2	Bintang Mitra Semestarya Tbk	BMSR	19.569.224.683	3.097.905.406	5.556.962.755	289.800.006.000	168.084.003.480	162.288.003.360	- 0,06753	- 0,01843	0,03424
3	Dua Putra Utama Makmur Tbk	DPUM	90.940.950.633	105.548.625.881	8.486.766.111	4.133.250.000.000	2.734.625.000.000	1.160.650.000.000	0,02200	0,03860	0,00731
4	Inter Delta Tbk	INTD	1.226.300.267	1.680.588.246	1.729.634.987	44.978.928.000	76.937.640.000	266.322.600.000	0,02726	0,02184	0,00649
5	Tira Austenite Tbk	TIRA	1.111.674.690	10.764.777.724	396.735.126	83.496.000.000	194.040.000.000	152.880.000.000	0,01331	- 0,05548	- 0,00260
6	Ace Hardware Indonesia Tbk	ACES	706.150.082.276	780.686.814.661	976.273.356.597	14.148.750.000.000	14.320.250.000.000	19.808.250.000.000	0,04991	0,05452	0,04929
7	Sumber Alfaria Trijaya Tbk	AMRT	553.835.000.000	257.735.000.000	668.426.000.000	22.396.266.682.000	25.952.813.562.500	25.329.946.037.000	0,02473	0,00993	0,02639
8	Electronic City Indonesia Tbk	ECII	32.270.199.731	9.801.947.790	21.825.792.298	1.134.183.050.000	800.599.800.000	807.271.465.000	- 0,02845	- 0,01224	0,02704
9	Kokoh Inti Arebama Tbk	KOIN	6.699.824	14.597.991.710	9.993.012.908	284.444.682.280	294.253.119.600	292.291.432.136	- 0,00002	- 0,04961	- 0,03419
10	Matahari Department Store Tbk	LPPF	2.019.705.000.000	1.907.077.000.000	1.097.332.000.000	51.355.358.208.000	44.133.510.960.000	29.179.180.800.000	0,03933	0,04321	0,03761
11	Mitra Komunikasi Nusantara Tbk	MKNT	2.297.528.116	37.374.914.360	1.426.324.779	510.000.000.000	2.700.000.000.000	1.310.000.000.000	0,00450	0,01384	- 0,00109
12	Trikonsel Oke Tbk	TRIO	504.992.012.209	189.940.195.572	17.088.974.878	9.523.000.000.000	9.523.000.000.000	52.014.989.290.000	- 0,05303	- 0,01995	- 0,00033
13	Anugerah Kagum Karya Utama Tbk	AKKU	4.927.346.390	19.453.731.339	9.638.897.778	75.900.000.000	477.260.309.064	348.271.036.344	- 0,06492	- 0,04076	- 0,02768
14	Bukit Uluwatu Villa Tbk	BUVA	12.683.120.556	39.112.510.912	13.854.741.330	1.842.138.742.500	1.941.211.722.000	1.770.929.992.000	0,00688	0,02015	0,00782
15	Saraswati Griya Lestari Tbk	HOTL	13.919.014.091	13.435.576.495	11.154.831.905	472.150.033.250	450.850.031.750	337.250.137.940	- 0,02948	0,02980	- 0,03308
16	Indonesian Paradise Property Tbk	INPP	181.566.742.860	147.427.151.843	122.894.269.254	4.003.145.880.056	6.317.814.028.580	7.268.281.625.800	0,04536	0,02334	0,01691
17	Panorama Sentrawisata Tbk	PANR	2.905.942.000	36.090.327.000	25.036.800.000	540.000.000.000	750.000.000.000	660.000.000.000	0,00538	0,04812	- 0,03793
18	Pembangunan Graha Lestari Inda Tbk	PGLI	622.803.096	1.476.782.162	4.300.000.687	33.672.000.000	27.816.000.000	75.640.000.000	0,01850	0,05309	0,05685
19	Pudjadi & Sons Tbk	PNSE	655.081.613	27.728.693.128	10.060.854.778	326.305.719.864	718.032.146.400	997.266.870.000	- 0,00201	0,03862	- 0,01009
20	Red Planet Indonesia Tbk	PSKT	53.321.337.904	33.311.151.481	20.166.643.731	1.211.018.056.000	1.001.629.354.845	517.561.581.800	- 0,04403	- 0,03326	- 0,03896

Lampiran V
(Lanjutan)

No.	Nama	Kode	Net Income (Eit)			Market Value of Equity (MV t-1)			Scaled Earnings Change		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
21	Pioneerindo Gourmet International Tbk	PTSP	4.509.517.000	10.245.713.000	19.726.369.000	1.876.868.000.000	1.611.898.400.000	1.589.817.600.000	0,00240	0,00636	0,01241
22	Hotel Sahid Jaya International Tbk	SHID	763.198.004	1.458.068.918	1.716.844.066	610.032.761.560	1.001.796.920.360	1.734.955.560.400	0,00125	0,00146	0,00099
23	Elang Mahkota Teknologi Tbk	EMTK	892.885.880.000	447.944.371.000	2.305.536.736.000	58.092.334.152.600	56.259.323.608.950	53.580.308.199.000	0,01537	0,00796	- 0,04303
24	MNC Sky Vision Tbk	MSKY	197.442.000.000	289.337.000.000	228.114.000.000	9.430.287.810.000	8.119.936.957.000	7.070.949.885.480	- 0,02094	- 0,03563	- 0,03226
25	Surya Citra Media Tbk	SCMA	1.513.628.912.000	1.317.748.064.000	1.475.042.200.000	45.326.963.825.400	40.940.483.455.200	36.261.571.060.320	0,03339	0,03219	0,04068
26	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	MIKA	720.721.429.886	708.761.732.542	658.737.307.293	34.921.766.400.000	37.395.391.520.000	26.336.832.160.000	0,02064	0,01895	0,02501
27	Sarana Meditama Metropolitan Tbk	SAME	14.795.337.338	72.015.135.309	58.883.226.709	3.127.000.000.000	3.304.000.000.000	3.363.000.000.000	0,00473	0,02180	0,01751
28	Siloam International Hospitals Tbk	SILO	98.701.000.000	103.521.000.000	26.393.000.000	11.329.780.000.000	14.176.676.250.000	15.566.705.859.375	0,00871	0,00730	0,00170
29	Sejahteraya Anugrahjaya Tbk	SRAJ	97.506.908.717	101.281.094.785	95.600.579.196	2.971.278.929.410	2.663.939.291.364	2.642.103.723.402	- 0,03282	- 0,03802	- 0,03618
30	Anabatic Technologies Tbk	ATIC	73.214.143.692	79.089.339.791	68.659.723.049	1.340.625.000.000	1.359.382.250.000	1.668.758.900.000	0,05461	0,05818	0,04114
31	Indoritel Makmur Internasional Tbk	DNET	398.072.946.858	170.793.416.762	282.868.126.051	16.240.680.000.000	15.602.400.000.000	31.914.000.000.000	0,02451	0,01095	0,00886
32	Polaris Investama Tbk	PLAS	19.430.491.620	13.924.172.611	413.213.440	1.859.194.000.000	480.785.200.000	59.210.000.000	- 0,01045	- 0,02896	0,00698
33	Pool Advista Indonesia Tbk	POOL	18.571.826.625	224.980.802.445	60.865.054.994	672.732.071.960	3.923.895.429.760	9.113.182.279.200	0,02761	0,05734	- 0,00668

Lampiran VI
Scaled Earnings Change

No.	Nama	Kode	Scaled Earnings Change			Scaled Earnings Change		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	AKR Corporindo Tbk	AKRA	0,00004	0,00004	0,00003	1	1	1
2	Bintang Mitra Semestaraya Tbk	BMSR	-0,06753	-0,01843	-0,03424	0	0	1
3	Dua Putra Utama Makmur Tbk	DPUM	0,02200	0,03860	-0,00731	1	1	1
4	Inter Delta Tbk	INTD	0,02726	0,02184	0,00649	1	1	1
5	Tira Austenite Tbk	TIRA	0,01331	-0,05548	-0,00260	1	0	0
6	Ace Hardware Indonesia Tbk	ACES	0,04991	0,05452	0,04929	1	1	1
7	Sumber Alfaria Trijaya Tbk	AMRT	0,02473	0,00993	0,02639	1	1	1
8	Electronic City Indonesia Tbk	ECII	-0,02845	-0,01224	-0,02704	0	0	1
9	Kokoh Inti Arebama Tbk	KOIN	-0,00002	-0,04961	-0,03419	0	0	0
10	Matahari Department Store Tbk	LPPF	0,03933	0,04321	0,03761	1	1	1
11	Mitra Komunikasi Nusantara Tbk	MKNT	0,00450	0,01384	-0,00109	1	1	0
12	Trikonsel Oke Tbk	TRIO	-0,05303	-0,01995	-0,00033	0	0	0
13	Anugerah Kagum Karya Utama Tbk	AKKU	-0,06492	-0,04076	-0,02768	0	0	0
14	Bukit Uluwatu Villa Tbk	BUVA	0,00688	0,02015	0,00782	1	1	1
15	Saraswati Griya Lestari Tbk	HOTL	-0,02948	0,02980	-0,03308	0	1	0
16	Indonesian Paradise Property Tbk	INPP	0,04536	0,02334	0,01691	1	1	1
17	Panorama Sentrawisata Tbk	PANR	0,00538	0,04812	-0,03793	1	1	0
18	Pembangunan Graha Lestari Inda Tbk	PGLI	0,01850	0,05309	-0,05685	1	1	1
19	Pudjiadi & Sons Tbk	PNSE	-0,00201	0,03862	-0,01009	0	1	0
20	Red Planet Indonesia Tbk	PSKT	-0,04403	-0,03326	-0,03896	0	0	0
21	Pioneerindo Gourmet International Tbk	PTSP	0,00240	0,00636	0,01241	1	1	1
22	Hotel Sahid Jaya International Tbk	SHID	0,00125	0,00146	0,00099	1	1	1
23	Elang Mahkota Teknologi Tbk	EMTK	0,01537	0,00796	-0,04303	1	1	0
24	MNC Sky Vision Tbk	MSKY	-0,02094	-0,03563	-0,03226	0	0	0
25	Surya Citra Media Tbk	SCMA	0,03339	0,03219	0,04068	1	1	1
26	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	MIKA	0,02064	0,01895	0,02501	1	1	1
27	Sarana Meditama Metropolitan Tbk	SAME	0,00473	0,02180	0,01751	1	1	1
28	Siloam International Hospitals Tbk	SILO	0,00871	0,00730	0,00170	1	1	1
29	Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk	SRAJ	-0,03282	-0,03802	-0,03618	0	0	0
30	Anabatic Technologies Tbk	ATIC	0,05461	0,05818	0,04114	1	1	1
31	Indoritel Makmur Internasional Tbk	DNET	0,02451	0,01095	-0,00886	1	1	1
32	Polaris Investama Tbk	PLAS	-0,01045	-0,02896	-0,00698	0	0	1
33	Pool Advista Indonesia Tbk	POOL	0,02761	0,05734	-0,00668	1	1	0

